

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, JUMLAH INDUSTRI DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK REKLAME**

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ULVA NOVITA SARI
NIM. 145030400111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2018

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al Insyirah 94:6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

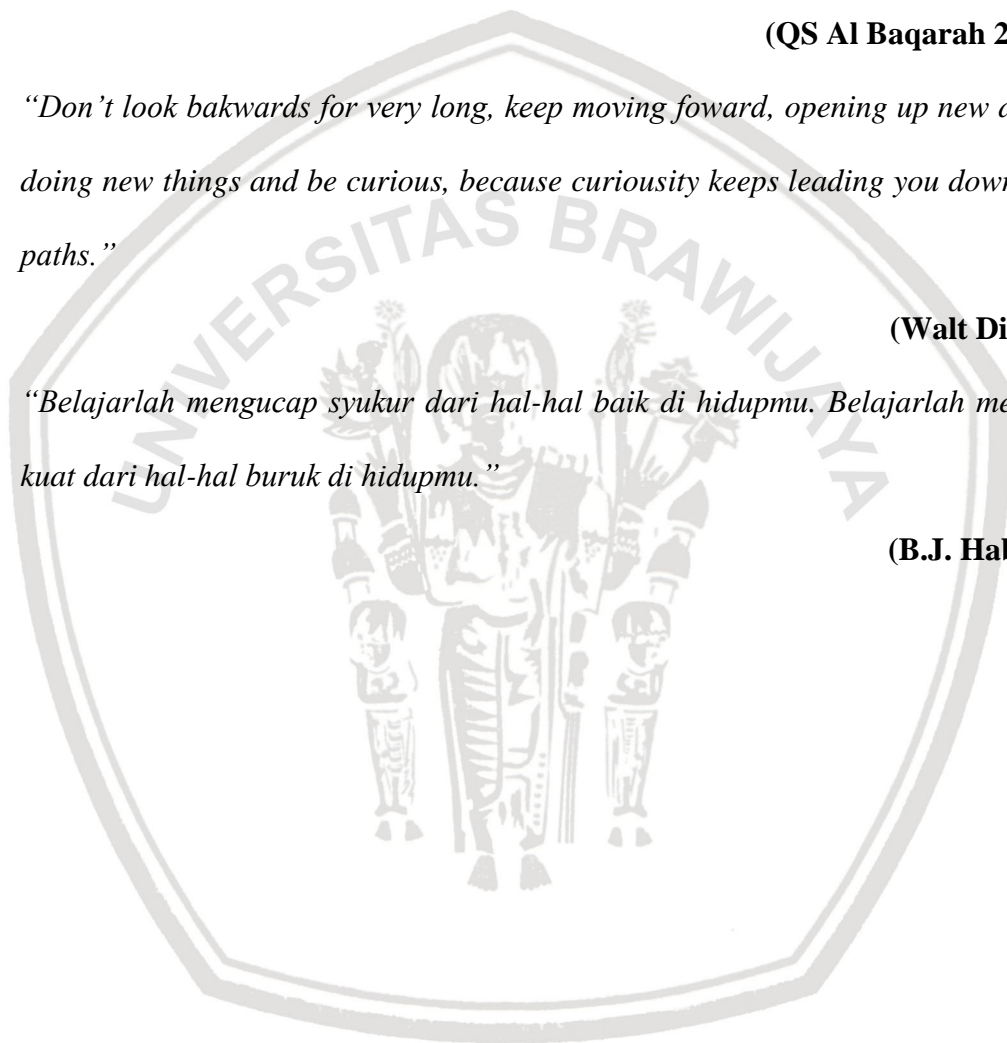
(QS Al Baqarah 2:286)

“Don’t look bakwards for very long, keep moving foward, opening up new doors, doing new things and be curious, because curiosity keeps leading you down new paths.”

(Walt Disney)

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

(B.J. Habibie)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015)

Disusun Oleh : Ulva Novita Sari

NIM : 145030400111012

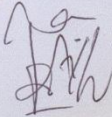
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 18 Oktober 2018
Komisi Pembimbing



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 200 2

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:


Hari : Senin
 Tanggal : 10 Desember 2018
 Jam : 11.00
 Skripsi atas nama : Ulva Novita Sari
 Judul : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015)

Dan dinyatakan

LULUS

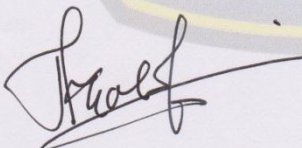
MAJELIS PENGUJI

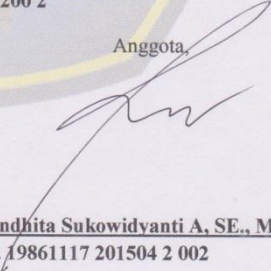
Ketua


Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
 NIP. 19750627 199903 200 2

Anggota,

Anggota,


M. Kholid Mawardi, S.Sos., M.AB., Ph.D
 NIP. 19751220 200501 1 002


Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA.Ak
 NIP. 19861117 201504 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
FF69AAFF170394272
6000
ENAM RIBURUPIAH
Ulva Novita Sari
NIM. 145030400111012

RINGKASAN

Ulva Novita Sari, 2018, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015). Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB. 122 Hal + xvii

Reklame merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Kemampuan reklame dalam menyampaikan pesan kepada konsumen mempunyai peran untuk keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa. Pajak Reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilaksanakan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis. Masalah yang sering dihadapi pada sektor Pajak Reklame adalah kurang kesadaran dan peran masyarakat dalam meningkatkan Pajak Reklame. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian explanatif (*explanatory research*). Penelitian ini mengambil objek pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah sampel penelitian yang diseleksi dengan teknik sampel jenuh adalah sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota. Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan *software SPSS* versi 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Koefisien Determinasi sebesar 60,9% yang menjelaskan bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Sisa dari nilai tersebut sebesar 39,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil Uji t menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan Penerimaan Pajak Reklame

SUMMARY

Ulva Novita Sari, 2018, The Effect of Gross Regional Domestic Product, Number of Industries and Number of Population on Advertising Tax Revenue (Study on Districts and Cities in East Java Province 2013-2015). Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB. 122 Page + xvii

Advertising is an inseparable part of the system and social modern society. The ability of billboards to deliver messages to consumers has a role for the success of the company in marketing products and services. Advertising tax is a potential source of regional income and collection can be carried out efficiently, effectively and economically. The problem that is often faced in the Advertising Tax sector is the lack of awareness and the role of the community in increasing Advertisement Taxes. There are several factors that influence billboard tax receipts, such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), Number of Industries and Number of Population.

The type of research used is quantitative research using an explanatory research design (explanatory research). This research takes the object of the Central Statistics Agency of East Java Province and the Directorate General of Financial Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The number of research samples selected by saturated sample technique is 29 regencies and 9 cities. Data Analysis Techniques used are Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS version 21 software.

The results of this study indicate the value of the Determination Coefficient is 60.9% which explains that the independent variable provides almost all the information needed to predict the dependent variable. The rest of the value of 39.1% is explained by other variables not examined in this study. The F Test results show that the independent variables simultaneously affect the dependent variable. The t test results show that the Gross Regional Domestic Product, the Number of Industries and the Number of Population have a significant effect on the Advertising Tax Revenue.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Number of Industries, Number of Population and Advertising Tax Revenue*

LEMBAR PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
UNTUK IBUK, BAPAK, TETEH DAN
MAS TERCINTA**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur diucapkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015)”**. Tujuan penyusunan skripsi tidak lain adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono., MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg., MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran yang terbaik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Perpajakan yang telah memberikan banyak pelajaran selama perkuliahan.
6. Keluarga peneliti Ibuk Ismiati, Bapak Mispanto dan Tete Lilis Nilawati yang selalu memberi dukungan moril dan materiil.
7. Teman-teman Cantik, Rempong Girls dan Perpajakan 2014 yang memberikan info terkait skripsi.
8. Teman-teman UKM Unitantri dan LOF Sanggar Seni Mahasiswa yang memberikan pengalaman berorganisasi sehingga memudahkan saat melaksanakan penelitian skripsi.
9. M. Imam Mukhlisin, Monika Eka Afrianti, Setinda, Rima Dwi Anggraeni, Ninik Eka Trissiana dan Liza Nur Laili yang memberikan bantuan sehingga memudahkan saat pengerjaan skripsi.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang, 18 Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
1. Kontribusi Akademis.....	8
2. Kontribusi Praktis.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
1. Putri (2013).....	12
2. Ulfiyah (2015)	12
3. Fatah (2015).....	13
4. Trisianto <i>et al</i> (2015)	14
5. Ramadan (2017).....	15
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Teori Fischer.....	19
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	20
3. Teori Schumpeter.....	21
4. Produk Domestik Regional Bruto.....	22
5. Industri	24
6. Penduduk	25
7. Pajak Daerah.....	27
a. Pengertian Pajak Daerah	27
b. Dasar Hukum Pajak Daerah	27
c. Jenis Pajak Daerah	27
d. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	29

e. Cara Perhitungan Pajak Daerah	29
8. Pajak Reklame	30
a. Pengertian Pajak Reklame	30
b. Subjek Pajak Reklame	30
c. Objek Pajak Reklame	31
d. Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame	31
e. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	32
f. Tarif Pajak Reklame	33
C. Model Konsep dan Hipotesis	33
1. Model Konsep	33
2. Hipotesis	34
D. Pengembangan Hipotesis	35
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Reklame	35
2. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Reklame	36
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Reklame	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	42
1. Variabel Penelitian	42
a. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	42
b. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	42
2. Definisi Operasional Variabel	43
a. Produk Domestik Regional Bruto	43
b. Jumlah Industri	43
c. Jumlah Penduduk	44
d. Penerimaan Pajak Reklame	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
1. Jenis Data	45
2. Sumber Data	45
E. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi	46
2. Sampel	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
1. Uji Statistik Deskriptif	48
2. Uji Statistik Inferensial	49
a. Analisis Regresi Linier Berganda	49
b. Uji Asumsi Klasik	50
1) Uji Normalitas	50
2) Uji Multikolinearitas	50
3) Uji Heteroskedastisitas	51

4) Uji Autokorelasi	52
c. Uji Hipotesis	52
1) Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	52
2) Uji Statistik F	53
3) Uji Statistik t.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur	54
a. Informasi Umum BPS	54
b. Visi dan Misi BPS	55
c. Struktur Organisasi BPS	56
d. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS	58
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	60
a. Sejarah DJPK	60
b. Visi dan Misi DJPK	61
c. Struktur Organisasi DJPK	61
d. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan DJPK.....	65
B. Penyajian dan Analisis Data Penelitian	66
1. Penyajian Data	66
a. Produk Domestik Regional Bruto	66
b. Jumlah Industri.....	68
c. Jumlah Penduduk	70
d. Penerimaan Pajak Reklame.....	72
2. Uji Statistik Deskriptif	74
a. Produk Domestik Regional Bruto (X_1)	75
b. Jumlah Industri (X_2).....	78
c. Jumlah Penduduk (X_3)	81
d. Penerimaan Pajak Reklame (Y)	84
3. Uji Statistik Inferensial	88
a. Analisis Regresi Linier Berganda	88
b. Uji Asumsi Klasik	89
1) Uji Normalitas	89
2) Uji Multikolinieritas	91
3) Uji Heteroskedastisitas	93
4) Uji Autokorelasi	95
c. Uji Hipotesis	96
1) Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	96
2) Uji Statistik F	97
3) Uji Statistik t.....	98

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	100
1. Hasil Hipotesis 1.....	100
2. Hasil Hipotesis 2.....	101
3. Hasil Hipotesis 3.....	102
4. Hasil Hipotesis 4.....	104
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	16
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015	67
3	Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	68
4	Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	71
5	Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	73
6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015	75
7	Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	78
8	Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	81
9	Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015.....	84
10	Uji Statistik Deskriptif	87
11	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	88
12	Hasil Uji Normalitas	90
13	Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi	91
14	Hasil Uji Multikolinieritas	92
15	Hasil Uji Glejser.....	94
16	Hasil Uji Autokorelasi.....	95
17	Hasil Uji Koefisien Determinasi	96
18	Hasil Uji Statistik F.....	97
19	Hasil Uji Statistik t.....	98

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Konsep	33
2	Hipotesis.....	34
3	Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Timur	58
4	Struktur Organisasi DJPK Kemenkeu RI.....	64
5	Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	94



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Pemberitahuan Informasi.....	112
2	Data Variabel X_1 dan X_2	113
3	Data Variabel X_3 dan Y	115
4	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	117
5	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	118
6	Hasil Uji Normalitas	118
7	Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi	119
8	Hasil Uji Multikolinieritas	119
9	Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	120
10	Hasil Uji Glejser.....	120
11	Hasil Uji Autokorelasi.....	120
12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	121
13	Hasil Uji Statistik F.....	121
14	Hasil Uji Statistik t	121
15	<i>Curriculum Vitae</i>	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reklame merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Reklame telah berkembang menjadi suatu alat komunikasi yang penting bagi produsen dan konsumen. Kemampuan reklame dalam menyampaikan pesan kepada konsumen mempunyai peran untuk keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa (Madina, 2015). Reklame dianggap sebagai alat pemasaran yang efektif dan menguntungkan untuk menarik calon konsumen karena dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut menjadikan reklame sebagai salah satu potensi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah (Lengkong *et al*, 2015).

Produsen yang melaksanakan promosi dengan memasang reklame akan dikenakan tarif berupa pajak. Dari kegiatan promosi tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan pemasukan berupa tarif atas pemasangan reklame berupa Pajak Reklame. Pajak Reklame mempunyai kemampuan untuk memperkuat posisi keuangan (Madina, 2015). Pajak Reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilaksanakan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga lebih berperan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasan Pajak Reklame dikenakan Pajak karena reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang tertentu yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum (Ulfyah, 2015).

Masalah yang sering dihadapi pada sektor Pajak Reklame adalah kurang kesadaran dan peran masyarakat dalam meningkatkan Pajak Reklame. Misalkan reklame yang tidak memiliki ijin pemasangan dari Pemerintah Daerah setempat dan reklame yang telah kadaluwarsa. Selain itu juga terdapat reklame politik yang ilegal dan tidak tertata secara rapi, sehingga dapat merusak pemandangan dan mengurangi Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Daerah kurang memberikan sosialisasi terkait Pajak Reklame dan kurang pengawasan dari aparat pemerintah (Sulistiyoningsih, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame, dari faktor-faktor tersebut diambil tiga faktor yang dianggap berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame, yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk (Ramadan, 2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai *output* barang dan jasa akhir yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. Kegiatan ekonomi tersebut adalah pertanian, pertambangan industri pengolahan dan jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto termasuk salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur perekonomian di suatu wilayah (Ulfiyah, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto dapat dikaitkan dengan Teori Fischer. Teori Fischer membahas tentang hubungan Pajak Daerah dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto. Fischer menyatakan bahwa terdapat tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Meliputi pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi

(*consumption*) dan kekayaan (*wealth*) (Yogyandaru, 2013). Berdasarkan pendapat Fischer, maka kategori pajak yang berbasis konsumsi adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan (Fadly, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena saat Produk Domestik Regional Bruto meningkat, maka akan membawa pengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan meningkatkan kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk Pajak Daerah. Didukung dengan Teori Fischer yang menyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan kategori pajak yang berbasis konsumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pajak Reklame.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisianto *et al* (2015) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi apabila Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada seluruh jenis usaha menurun. Penurunan jenis usaha menimbulkan daya beli masyarakat dan ekonomi di daerah tersebut menurun juga. Kejadian tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap Pajak Reklame adalah Jumlah Industri. Jumlah Industri yaitu jumlah usaha industri kecil, menengah atau besar

yang berbasis agro dan non agro. Jumlah Industri akan memprediksi perubahan yang terjadi dalam suatu daerah, oleh karena itu industri akan menyesuaikan guna meningkatkan keuntungan (Ulfiyah, 2015). Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016:180).

Jumlah Industri dapat dikaitkan dengan Teori Schumpeter yang menekankan peran penting pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha termasuk golongan yang selalu membuat pembaharu atau inovasi yang menguntungkan dalam kegiatan ekonomi. Pengusaha akan meminjam modal dan melakukan investasi, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara, sehingga konsumsi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Peningkatan tersebut memacu sektor industri lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan investasi (Ulfiyah, 2015).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadan (2017) menjelaskan bahwa Jumlah Industri berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena peningkatan variasi produk barang dan jasa yang tersedia akan menambah objek Pajak Reklame, sehingga Penerimaan Pajak Reklame meningkat. Tristiano *et al* (2015) juga menyatakan bahwa dengan peningkatan Jumlah Industri yang membutuhkan sarana untuk memasarkan produk mereka dengan cara memasang reklame, maka akan memberikan

pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatah (2015) yang menjelaskan bahwa Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak yang dipungut dari suatu industri tidak hanya Pajak Reklame, selain itu juga karena tidak semua industri memasang reklame.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap Pajak Reklame adalah Jumlah Penduduk. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016:35-36). Berdasarkan teori konsumsi rumah tangga, konsumsi akan meningkat saat Jumlah Penduduk bertambah. Peningkatan konsumsi menyebabkan permintaan barang dan jasa juga meningkat, sehingga pemilik industri tertarik untuk memperluas industri di daerah tersebut. Jumlah Penduduk juga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia (Fatah, 2015).

Jumlah Penduduk dapat dikaitkan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik. Dalam pandangan klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi. Pakar ekonomi klasik lebih menekankan pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah Penduduk akan bertambah apabila tingkat upah naik, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat penawaran tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat *output* masyarakat. Dalam hal penduduk sedikit dan kekayaan alam berlebih,

maka tingkat pengembalian modal dari investasi menjadi tinggi, sehingga pengusaha akan memperoleh keuntungan besar dan membuat investasi baru, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terwujud (Ulfiyah, 2015).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadan (2017) menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut dapat terjadi karena Jumlah Penduduk yang banyak akan menambah permintaan barang dan jasa, sehingga jumlah konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Seiring waktu peningkatan konsumsi agregat menyebabkan usaha-usaha produktif berkembang, serta meningkatkan objek Pajak Reklame. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan usaha-usaha perekonomian lebih banyak daripada pertumbuhan penduduk, sehingga penggunaan jasa reklame dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha-usaha perekonomian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka akan diketahui apakah terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Pajak Reklame. Peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y)?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y)?
3. Apakah Jumlah Industri (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y)?
4. Apakah Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X_1) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Jumlah Industri (X_2) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Jumlah Penduduk (X_3) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, kontribusi yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang sama. Khususnya penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame.

2. Kontribusi Praktis

Adapun kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan bagi masyarakat luas, khususnya terkait Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Reklame.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam rangka pengelolaan Pajak Reklame dan dapat meningkatkan potensi penerimaan Pajak Reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari penelitian skripsi ini dari masing-masing bab secara singkat. Adapun sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang Penelitian Terdahulu, Tinjauan Teoritis, Pengaruh Antar Variabel serta Model Konsep dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab Metode Penelitian berisi tentang Jenis dan Lokasi Penelitian, Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data Penelitian, Analisis Data meliputi Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis, serta penjelasan mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan

Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Reklame secara parsial maupun simultan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup berisi tentang Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan Saran yang telah diberikan setelah melaksanakan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian terdahulu baik berupa teori maupun hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Putri (2013), Ulfiyah (2015), Fatah (2015), Trisianto *et al* (2015) dan Ramadan (2017). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena mengambil tema yang sama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame. Selain memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga memiliki keterbaharuan.

Keterbaharuan dari penelitian ini adalah terkait jenis data yang diambil. Penelitian terdahulu menggunakan jenis data *time series*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel, yang merupakan penggabungan dari data *time series* dan *cross section*. Keterbaharuan yang lain dari penelitian ini terkait studi yang ditentukan. Penelitian terdahulu menentukan studi pada satu Kabupaten atau Kota saja, sedangkan penelitian ini menentukan studi pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu terdapat 29 Kabupaten dan 9 Kota. Keterbaharuan yang lain dari penelitian ini terkait teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Teori Schumpeter saja, sedangkan penelitian ini juga menambahkan Teori Fischer. Berikut penjelasan singkat terkait penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Putri (2013)

Penelitian yang ditulis oleh Putri (2013) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi Jumlah Penduduk (X_1), Pendapatan Per Kapita (X_2), Inflasi (X_3) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (X_4), sedangkan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y). Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian tersebut adalah data sekunder yang diperoleh melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian tersebut yaitu Jumlah Penduduk (X_1) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y), kemudian Pendapatan Per Kapita (X_2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y), lalu Inflasi (X_3) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (X_4) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

2. Ulfiyah (2015)

Penelitian yang ditulis oleh Ulfiyah (2015) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi Jumlah Penduduk (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3), sedangkan variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu metode dokumentasi. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian tersebut yaitu data realisasi Penerimaan Pajak Reklame yang bersumber dari

Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Surabaya, sedangkan Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan Kota Surabaya selama tahun 2004-2014 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut yakni Jumlah Penduduk (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y), kemudian Jumlah Industri (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

3. Fatah (2015)

Penelitian yang ditulis oleh Fatah (2015) berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame dan Efeknya Pada Penerimaan Pajak Daerah. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi Jumlah Penduduk (X_1) dan Jumlah Industri (X_2), sedangkan variabel dependen meliputi Penerimaan Pajak Reklame (Y_1) dan Penerimaan Pajak Daerah (Y_2). Jenis penelitian tersebut adalah penelitian penjelasan/eksplanatif (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian tersebut yaitu semua tahun periode anggaran sebanyak 14 tahun dengan menggunakan interpolasi data yakni membagi data menjadi empat bagian (kuartal) melalui proses interpolasi data tahunan. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian tersebut adalah Jumlah Penduduk (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y_1), kemudian Jumlah Industri (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y_1), lalu

Penerimaan Pajak Reklame (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y_2), setelah itu Jumlah Penduduk (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y_2) dan Jumlah Industri (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y_2).

4. Trisianto *et al* (2015)

Penelitian yang ditulis oleh Trisianto *et al* (2015) berjudul Pengaruh Jumlah Industri, PDRB dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi Jumlah Industri (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_2) dan Pendapatan Per Kapita (X_3), sedangkan variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang menggunakan deret berkala (*time series*) dalam waktu 2011-2013. Data Jumlah Industri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Sedangkan data Penerimaan Pajak Reklame diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Palembang. Teknik pengumpulan data penelitian tersebut adalah dokumentasi karena data tersebut merupakan data sekunder. Hasil penelitian tersebut yaitu Jumlah Industri (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y), kemudian Produk Domestik Regional Bruto (X_2) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y) dan

Pendapatan Per Kapita (X_3) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

5. Ramadan (2017)

Penelitian yang ditulis oleh Ramadan (2017) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Variabel independen dalam penelitian tersebut meliputi Jumlah Penduduk (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3), sedangkan variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y). Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Sampel yang diambil untuk penelitian tersebut adalah Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Produk Domestik Regional Bruto dan Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Malang. Data yang diambil terbatas tahun 2009-2013. Hasil penelitian tersebut yaitu Jumlah Penduduk (X_1) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y), kemudian Jumlah Industri (X_2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y).

Berikut disajikan tabel terkait perbedaan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil
1.	Putri (2013)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI PENERIMAAN PAJAK	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Surat Ijin Usaha Perdagangan b. Lokasi Penelitian c. Jenis Data 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame b. Pendapatan Per Kapita berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame c. Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame d. Surat Ijin Usaha Perdagangan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame
2.	Ulfyah (2015)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA SURABAYA	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi Penelitian b. Jenis Data 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame b. Jumlah Industri berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame

Lanjutan Tabel 1. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil
3.	Fatah (2015)	PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN EFEKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) b. Variabel Terikat Penerimaan Pajak Daerah c. Lokasi Penelitian d. Model Analisis Jalur e. Jenis Data 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame b. Jumlah Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame c. Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah d. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah e. Jumlah Industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Lanjutan Tabel 1. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Hasil
4.	Trisianto <i>et al</i> (2015)	PENGARUH JUMLAH INDUSTRI, PDRB DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG	a. Variabel Pendapatan Per Kapita b. Lokasi Penelitian c. Jenis Data	a. Jumlah Industri berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame c. Pendapatan Per Kapita tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame
5.	Ramadan (2017)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Lokasi Penelitian b. Jenis Data	a. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame b. Jumlah Industri berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame c. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Fischer

Teori Fischer menyatakan bahwa terdapat tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Meliputi pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*) dan kekayaan (*wealth*) (Yogyandaru, 2013). Berdasarkan pendapat Fischer tersebut dapat dikategorikan pajak yang berbasis konsumsi adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan (Fadly, 2016). Teori ini dapat dikaitkan dengan hubungan antara faktor pertumbuhan ekonomi dan Pajak Daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan total nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor atau kegiatan ekonomi pada kurun waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan pendapatan dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi (Yogyandaru, 2013).

Setiap konsumsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan suatu barang atau jasa yang merupakan basis atau objek Pajak Daerah. Hal tersebut akan meningkatkan penerimaan Pajak daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah Pajak Reklame. Indikator yang umum digunakan untuk mengetahui faktor pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tenaga kerja, yang termasuk dalam industri, perdagangan, hotel, restoran dan hiburan. Produk Domestik Regional Bruto mempunyai hubungan elastisitas yang positif terhadap Pajak Reklame. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto memberikan pengaruh

terhadap Pajak Reklame yang termasuk dalam kategori Pajak Daerah yang berbasis konsumsi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Dalam buku yang ditulis oleh Sukirno (2013:433) menjelaskan dari sudut pandang ahli-ahli ekonomi klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatian kepada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambah yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak terus menerus berlangsung.

Sukirno (2013:433) juga menjelaskan pada permulaan, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Para pengusaha kemudian akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung. Kepadatan penduduk akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas penduduk menjadi negatif, maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, hal ini menyebabkan ekonomi telah mencapai keadaan

tidak berkembang (*Stationary State*) dan membuat pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*Subsistence*).

3. Teori Schumpeter

Dalam buku yang ditulis oleh Sukirno (2013:434) Teori Schumpeter menekankan peranan penting pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut yaitu memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Schumpeter mengemukakan dalam (Sukirno, 2013:434) bahwa teori pertumbuhan memulai analisis dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara, maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan

tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.

Schumpeter dalam (Sukirno, 2013:434) juga menerangkan bahwa makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi berjalan lebih lambat dan pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*Stationary State*). Pandangan Schumpeter menyatakan bahwa keadaan tidak berkembang ini dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik yang tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan *subsistence*, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

4. Produk Domestik Regional Bruto

Dalam buku Provinsi Jawa Timur Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:337-338) dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB menggunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua pendekatan tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaan. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksi, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:338) juga menjelaskan PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:339-342) menjelaskan bahwa PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada

tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

5. Industri

Dalam buku Provinsi Jawa Timur Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:180) dijelaskan bahwa industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Pengumpulan data industri besar dan sedang dilakukan melalui Survei Industri Besar dan Sedang yang dilaksanakan setiap tahun secara lengkap (sensus) sejak tahun 1975. Survei Industri Besar dan Sedang mencakup semua perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih dengan menggunakan kuesioner II A. Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei berdasar kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) revisi 4 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:179-180) juga menjelaskan bahwa Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi dan setengah jadi, dan atau barang yang bernilai kurang menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, dan bersifat

lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk jasa industri dan pekerjaan perakitan. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyak pekerja, yaitu: industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang atau menengah (20–99 orang pekerja), industri kecil (5–19 orang pekerja), dan industri mikro (1–4 orang pekerja).

6. Penduduk

Dalam buku Provinsi Jawa Timur Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:35-36) Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Pencacahan dalam sensus penduduk dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarga. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil sensus penduduk 2010.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:35-36) juga menjelaskan metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggal, tetapi dicacah di tempat tujuan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:36-37) menerangkan laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batasbatas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

7. Pajak Daerah

Berikut beberapa penjelasan terkait pajak daerah:

a. Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 dalam (Halim, 2016:500) menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:499) terdapat tiga dasar hukum Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

c. Jenis Pajak Daerah

Dalam buku yang ditulis oleh Priantara (2016:556) menjelaskan bahwa lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum

dipungut oleh negara (pusat). Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Ketentuan bahwa pajak yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang tingkatannya lebih tinggi. Terdapat dua jenis pajak daerah, yaitu:

1) Pajak-pajak Provinsi yang terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah (PAT)
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Daerah dilarang memungut pajak selain Jenis Pajak di atas. Jenis Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan Kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2013:15) menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemneritahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

e. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Dalam buku yang ditulis oleh Siahaan (2016:91) menjelaskan bahwa besarnya Pajak Daerah secara umum dapat dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan pajak ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Formula perhitungan pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

8. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Dalam buku yang ditulis oleh Priantara (2016:562) menjelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Subjek Pajak Reklame

Dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:517) menjelaskan bahwa subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan maka Wajib Pajak reklame adalah

orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

c. Objek Pajak Reklame

Dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:517) menjelaskan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- 1) Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* dan Sejenisnya
- 2) Reklame Kain
- 3) Reklame Melekat, Stiker
- 4) Reklame Selebaran
- 5) Reklame Berjalan, Termasuk Kendaraan
- 6) Reklame Udara
- 7) Reklame Apung
- 8) Reklame Suara
- 9) Reklame Film/*Slide*
- 10) Reklame Peragaan

d. Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame

Dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:517) menjelaskan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- 2) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pemegang usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:517) menjelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Pengadaan reklame yang dilakukan oleh pihak ketiga berarti Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Reklame yang diselenggarakan sendiri berarti Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memahartikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Nilai Sewa Reklame yang tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan hasil perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

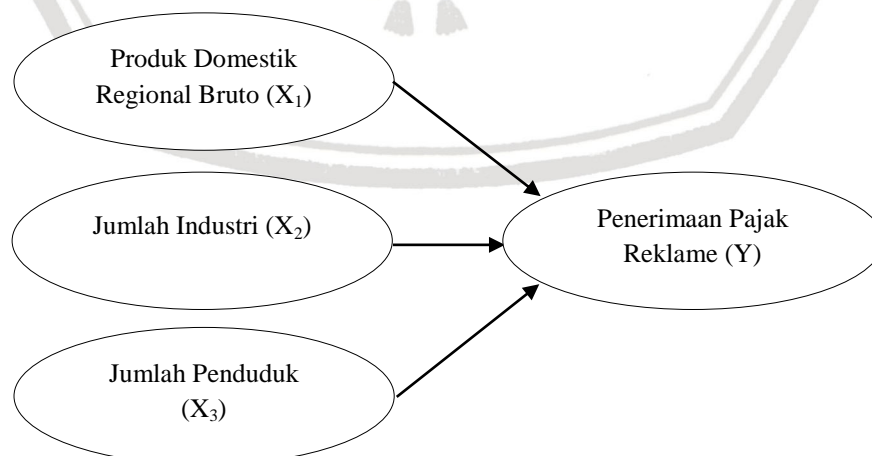
f. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame dalam buku yang ditulis oleh Halim (2016:518) yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009:91) mengemukakan bahwa model konsep yaitu bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dikenali sebagai masalah yang penting. Model konsep adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan merumuskannya dari masalah penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame, maka dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada gambar berikut:

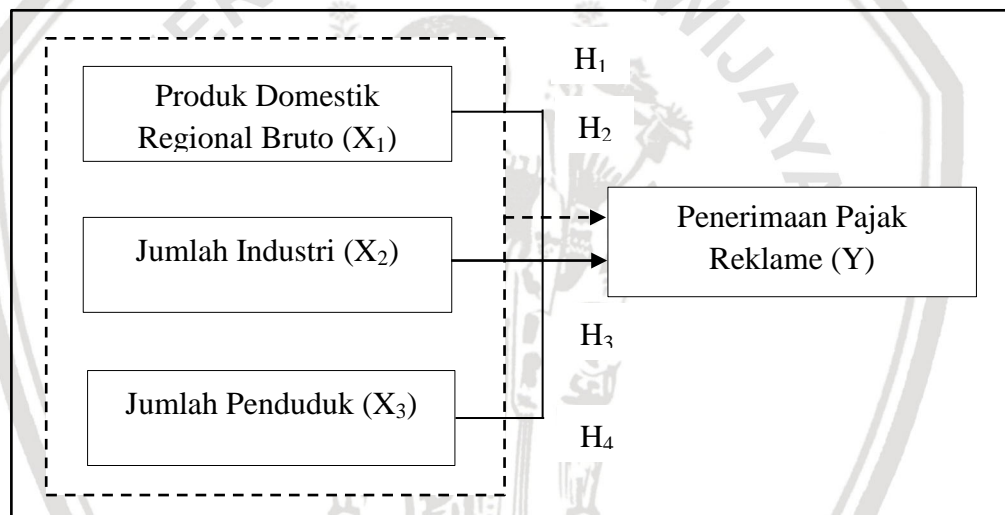


Gambar 1. Model Konsep

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2. Hipotesis

Dalam buku yang ditulis oleh Martono (2016:106) mengemukakan bahwa hipotesis (*hypothesis*) dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Berikut hipotesis yang diharapkan oleh peneliti:



Gambar 2. Hipotesis

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Keterangan:

-----> Berpengaruh signifikan secara simultan

————> Berpengaruh signifikan secara parsial

H₁ : Produk Domestik regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame.

- H₂ : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame.
- H₃ : Jumlah Industri berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame.
- H₄ : Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Reklame.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Reklame

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai *output* barang dan jasa akhir yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. Kegiatan ekonomi tersebut adalah pertanian, pertambangan industri pengolahan dan jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto termasuk salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur perekonomian di suatu wilayah (Ulfiyah, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto dapat dikaitkan dengan Teori Fischer. Teori Fischer membahas tentang hubungan Pajak Daerah dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto. Fischer menyatakan bahwa terdapat tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Meliputi pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*) dan kekayaan (*wealth*) (Yogyandaru,

2013). Berdasarkan pendapat Fischer, maka kategori pajak yang berbasis konsumsi adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan (Fadly, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena saat Produk Domestik Regional Bruto meningkat, maka akan membawa pengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan meningkatkan kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk Pajak Daerah. Didukung dengan Teori Fischer yang menyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan kategori pajak yang berbasis konsumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pajak Reklame.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisianto *et al* (2015) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi apabila Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada seluruh jenis usaha menurun. Penurunan jenis usaha menimbulkan daya beli masyarakat dan ekonomi di daerah tersebut menurun juga. Kejadian tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak menjadi rendah.

2. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Reklame

Jumlah Industri yaitu jumlah usaha industri kecil, menengah atau besar yang berbasis agro dan non agro. Jumlah Industri akan memprediksi perubahan

yang terjadi dalam suatu daerah, oleh karena itu industri akan menyesuaikan guna meningkatkan keuntungan (Ulfiyah, 2015). Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016:180).

Jumlah Industri dapat dikaitkan dengan Teori Schumpeter yang menekankan peran penting pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha termasuk golongan yang selalu membuat pembaharu atau inovasi yang menguntungkan dalam kegiatan ekonomi. Pengusaha akan meminjam modal dan melakukan investasi, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara, sehingga konsumsi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Peningkatan tersebut memacu sektor industri lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan investasi (Ulfiyah, 2015).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadan (2017) menjelaskan bahwa Jumlah Industri berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena peningkatan variasi produk barang dan jasa yang tersedia akan menambah objek Pajak Reklame, sehingga Penerimaan Pajak Reklame meningkat. Trisianto *et al* (2015) juga menyatakan bahwa dengan peningkatan Jumlah Industri yang membutuhkan sarana untuk memasarkan produk mereka dengan cara memasang reklame, maka akan memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Fatah (2015) yang menjelaskan bahwa Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak yang dipungut dari suatu industri tidak hanya Pajak Reklame, selain itu juga karena tidak semua industri memasang reklame.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Reklame

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016:35-36). Berdasarkan teori konsumsi rumah tangga, konsumsi akan meningkat saat Jumlah Penduduk bertambah. Peningkatan konsumsi menyebabkan permintaan barang dan jasa juga meningkat, sehingga pemilik industri tertarik untuk memperluas industri di daerah tersebut. Jumlah Penduduk juga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia (Fatah, 2015).

Jumlah Penduduk dapat dikaitkan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik. Dalam pandangan klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi. Pakar ekonomi klasik lebih menekankan pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah Penduduk akan bertambah apabila tingkat upah naik, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat penawaran tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat *output* masyarakat. Dalam hal penduduk sedikit dan kekayaan alam

berlebih, maka tingkat pengembalian modal dari investasi menjadi tinggi, sehingga pengusaha akan memperoleh keuntungan besar dan membuat investasi baru, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terwujud (Ulfiyah, 2015).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadan (2017) menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut dapat terjadi karena Jumlah Penduduk yang banyak akan menambah permintaan barang dan jasa, sehingga jumlah konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Seiring waktu peningkatan konsumsi agregat menyebabkan usaha-usaha produktif berkembang, serta meningkatkan objek Pajak Reklame. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan usaha-usaha perekonomian lebih banyak daripada pertumbuhan penduduk, sehingga penggunaan jasa reklame dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha-usaha perekonomian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian explanatif (*explanatory research*). Dalam buku yang ditulis oleh Creswell (2016:24) penelitian kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memerinci hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Sugiyono (2009:13) juga menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Martono (2016:201) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif (*explanatory research*) adalah penelitian yang berupaya menjelaskan mengapa suatu fenomena atau gejala sosial terjadi dengan menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Penelitian ini mencoba menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat.

Alasan menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena penelitian kuantitatif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang menjadi fenomena dalam bentuk angka, mengukur variabel-variabel yang ada dalam

penelitian. Sesuai dengan variabel-variabel yang dipilih oleh peneliti yaitu dalam bentuk angka. Alasan menggunakan desain penelitian ekplanatif (*explanatory research*) karena bertujuan untuk mencari hubungan antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat sesuai dengan inti dan jenis penelitian kuantitatif yang mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian yang harus dijelaskan dalam bentuk definisi operasional variabel.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk dengan studi pada lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dengan mengakses data melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yaitu www.jatim.bps.go.id. Mengenai Penerimaan Pajak Reklame penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terletak di Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat.

Alasan memilih Provinsi Jawa Timur karena penelitian terdahulu mengambil studi pada satu Kabupaten atau Kota saja. Melihat hal tersebut, penelitian ini membuat pembaharuan dengan mengambil studi pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Jawa Timur menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan. Jawa Timur mempunyai letak yang strategis di bidang industri karena berada diantara dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali (jatimprov.go.id).

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009: 58) menerangkan bahwa variabel adalah atribut, seseorang atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel Bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mungkin menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada *outcome*. Variabel ini juga dikenal dengan istilah variabel *treatment*, *manipulated*, *antecedent*, atau *predictor* (Creswell, 2016:24). Variabel Bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3).

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel Terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan *outcome* hasil dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel ini adalah variabel *criterion*, *outcome*, *effect*, dan *response* (Creswell, 2016:24). Variabel Terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Reklame (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Dalam buku yang ditulis oleh Nazir (2014:110) dijelaskan bahwa Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberi arti, atau mendefinisikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa akhir yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Data Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dengan kurun waktu selama 3 tahun yaitu dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Ukuran penelitian yang digunakan untuk data Produk Domestik Regional Bruto ini adalah dalam bentuk nominal rupiah (Rp).

b. Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah Industri Besar dan Sedang mencakup semua perusahaan industri seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih dengan menggunakan kuesioner II A. Data Jumlah Industri diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dengan kurun waktu selama 3 tahun yaitu dimulai pada tahun 2013 sampai

dengan 2015. Ukuran penelitian yang digunakan untuk data Jumlah Industri adalah dalam satuan unit.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal secara menetap pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyak jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi dan konsumsi dari penduduk yang menimbulkan permintaan agregat. Data Jumlah Penduduk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dengan kurun waktu 3 tahun yaitu dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Ukuran penelitian yang digunakan untuk data Jumlah Penduduk adalah dalam satuan jiwa.

d. Penerimaan Pajak Reklame

Penerimaan Pajak Reklame adalah seluruh jumlah pembayaran dari wajib pajak reklame seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Data Penerimaan Pajak Reklame diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan kurun waktu 3 tahun yaitu dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Ukuran penelitian yang digunakan untuk data Penerimaan Pajak Reklame adalah dalam bentuk nominal rupiah (Rp).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel. Dalam buku yang ditulis oleh Sriyana (2014:77) menjelaskan bahwa secara prinsip data panel adalah penggabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang (*cross-sectional time series*), dimana banyak objek penelitian misalkan negara, industri, bank atau bentuk lain yang diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data *time series*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dalam buku yang ditulis oleh Bungin (2014:132) dijelaskan bahwa data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Martono (2016:66) juga menjelaskan bahwa data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data atau memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2013 hingga 2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, sedangkan data realisasi Penerimaan Pajak

Reklame seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2013 hingga 2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam buku yang ditulis oleh Bungin (2014:141) dijelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini bisa menjadi sumber data penelitian. Martono (2016:250) juga menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu yang diteliti dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah data terkait Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan Penerimaan Pajak Reklame seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai dengan 2015.

2. Sampel

Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009:116) dijelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam keadaan populasi besar, dan tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi. Hal yang dipelajari dari sampel itu akan diberlakukan kesimpulan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili), sehingga perlu menggunakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.

Dalam buku yang ditulis oleh Sujarweni (2012:16) menerangkan bahwa sampel jenuh atau sampel sensus adalah teknik penentuan sampel dengan melibatkan semua anggota populasi sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seluruh data terkait Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan Penerimaan Pajak Reklame Kota Batu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai dengan 2015. Terdapat 29 Kabupaten dan 9 Kota serta kurun waktu selama 3 tahun, sehingga data yang akan diolah sejumlah 114 data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam buku yang ditulis oleh Martono (2016:80) menerangkan bahwa dokumentasi (*documentation*) adalah mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi yang merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Bungin (2014:154) juga menjelaskan bahwa metode dokumenter adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Kebanyakan data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan dan lain-lain. Sifat utama dari data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

G. Teknik Analisis Data

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:1) dijelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara sistematis dan dapat dilakukan interpretasi. Analisis data pada penelitian kuantitatif bisa dilakukan secara manual dengan menghitung menggunakan rumus-rumus statistik atau menggunakan program bantu statistik *SPSS*, *Minitab*, *XL-Stat*, *S-Plus* dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan program bantu statistik yaitu *SPSS(Statistical Product and Service Solution)* versi 21.

1. Uji Statistik Deskriptif

Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009:206-207) dijelaskan bahwa statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desit, presentil, perhitungan

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi serta perhitungan persentase.

2. Uji Statistik Inferensial

Dalam buku yang ditulis oleh Siregar (2014:2) menerangkan bahwa statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Statistik inferensial juga disebut statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan.

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam buku yang ditulis oleh Yamin (2014:82) dijelaskan bahwa Analisis Regresi Linier Berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara Variabel Terikat (Y) dengan satu atau lebih Variabel Bebas (X). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksikan nilai output berdasarkan nilai input tertentu. Dapat diketahui dengan Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Bebas (X) yang benar-benar signifikan mempengaruhi Variabel Terikat (Y). Model ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier antara Variabel Terikat (Y) dengan setiap Variabel Bebas (X). Hubungan linier ini digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Variabel Terikat (Penerimaan Pajak Reklame)
β_0	: Konstanta
X_1	: Variabel Bebas (Produk Domestik Regional Bruto)
X_2	: Variabel Bebas (Jumlah Industri)
X_3	: Variabel Bebas (Jumlah Penduduk)
β_1, β_2 dan β_3	: Koefisien regresi
e	: Kesalahan eror

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:118-125) dijelaskan bahwa Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Residual adalah nilai selisih antara Variabel Y dengan Variabel Y yang diprediksikan. Dalam metode regresi linier, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai *random error*(e) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal sehingga data layak untuk diuji secara statistik. Uji Normalitas pada regresi menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov*. Pengambilan keputusan untuk metode *One Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan jika signifikansi < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:129-131) menerangkan bahwa Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel atau

lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah multikolinearitas. Cara mendeteksi ada tidak multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*(*VIF*) pada hasil regresi linier. Pengambilan keputusan yaitu jika *Tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam buku yang ditulis oleh Ghozali (2016:134-138) menjelaskan bahwa Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam hal *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatterplot* dan Uji Glejser.

Dasar pengambilan keputusan grafik *Scatterplot* jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas. Dalam hal tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan Uji Glejser dengan melihat apabila nilai signifikan variabel independen apabila lebih dari 5%

dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas, apabila kurang dari 5% maka terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:139-142) menerangkan bahwa Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi. Cara mendeteksi ada tidak autokorelasi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*), yaitu dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* hasil dari regresi dengan nilai *Durbin-Watson* tabel. Pengambilan keputusan Uji *Durbin-Watson* yaitu jika $dU < DW < 4-dU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi). Dalam hal $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi). Dalam hal $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW < 4-dL$ maka tidak ada keputusan yang pasti.

c. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Dalam buku yang ditulis oleh Ghazali (2016:95) menerangkan bahwa Uji Koefisien Determinasi ini untuk mengukur seberapa jauh model regresi berganda dalam menerangkan variasi Variabel Terikat (Y). Menggunakan *Model Summary* dapat diketahui interval nilai *Adjusted R Square* adalah 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan Variabel Bebas (X) dalam menjelaskan Variabel Terikat (Y) sangat terbatas. Nilai

yang mendekati 1 berarti Variabel Bebas (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi Variabel Terikat (Y).

2) Uji Statistik F

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:63-65) Uji Statistik F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan besarnya nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Besar nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig. < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Besar nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig. > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3) Uji Statistik t

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:66-67) dijelaskan bahwa Uji Statistik t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan besaran nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Besar nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Besar nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Besar nilai $- t_{hitung} < - t_{tabel}$ dan $Sig. < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan apabila $- t_{hitung} > - t_{tabel}$ dan $Sig. > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

a. Informasi Umum BPS

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dahulu, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tersebut, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- 1) Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatan terdiri atas statistik dasar yang diselenggarakan secara penuh oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

3) Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- 2) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- 3) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- 4) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

b. Visi dan Misi BPS

1) Visi

Visi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.

2) Misi

Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

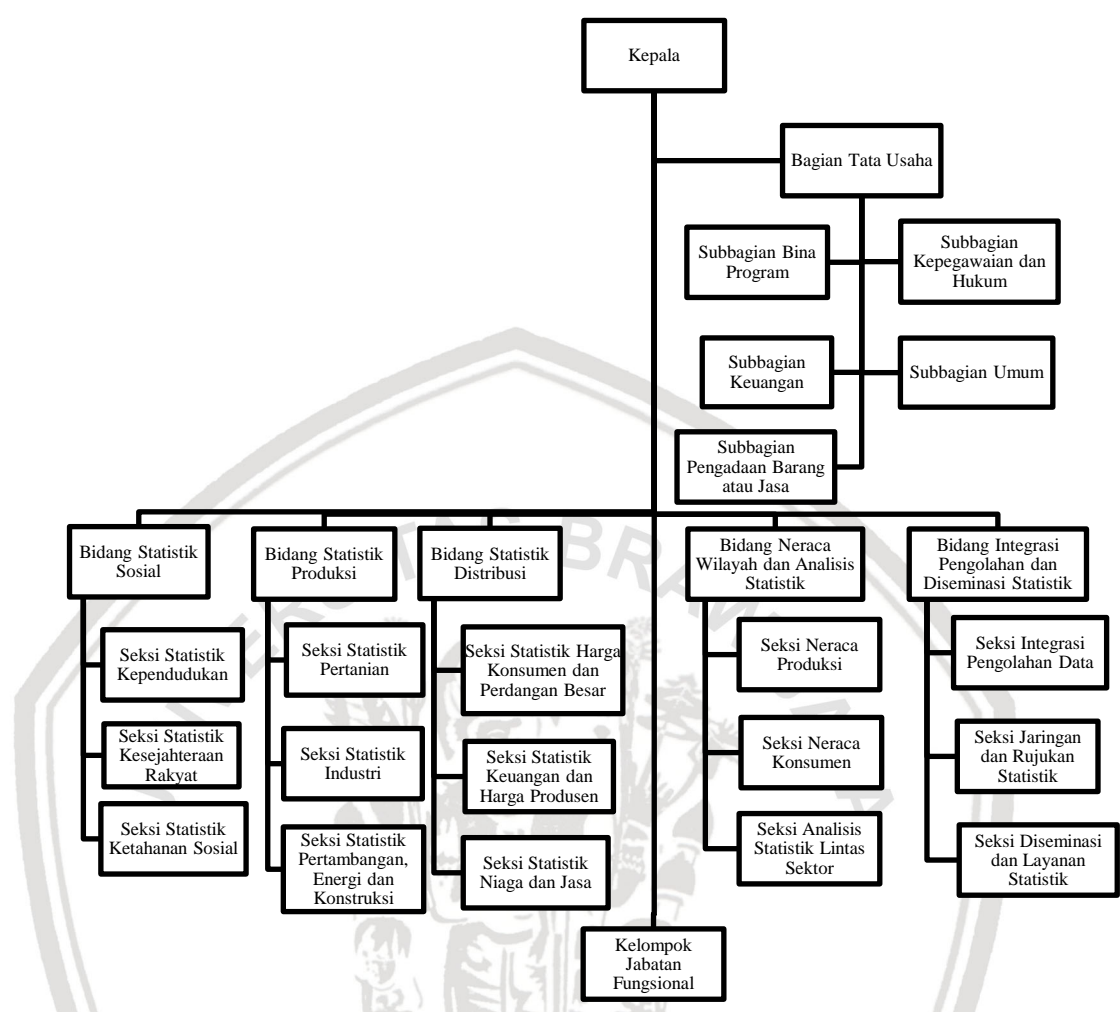
- a) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- b) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- c) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

c. Struktur Organisasi BPS

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

- 1) Kepala
- 2) Bagian Tata Usaha
 - a) Subbagian Bina Program
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Hukum
 - c) Subbagian Keuangan
 - d) Subbagian Umum
 - e) Subbagian Pengadaan Barang atau Jasa
- 3) Bidang Statistik Sosial
 - a) Seksi Statistik Kependudukan
 - b) Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat
 - c) Seksi Statistik Ketahanan Sosial

- 4) Bidang Statistik Produksi
 - a) Seksi Statistik Pertanian
 - b) Seksi Statistik Industri
 - c) Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi
- 5) Bidang Statistik Distribusi
 - a) Seksi Statistik Harga Konsumen dan Perdagangan Besar
 - b) Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen
 - c) Seksi Statistik Niaga dan Jasa
- 6) Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 - a) Seksi Neraca Produksi
 - b) Seksi Neraca Konsumen
 - c) Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
- 7) Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
 - a) Seksi Integrasi Pengolahan Data
 - b) Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik
 - c) Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

d. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.



1) Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik.
- b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.
- c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
- d) Penetapan sistem statistik nasional.
- e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik.
- f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3) Kewenangan

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- e) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

a. Sejarah DJPK

Dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18A, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2d, 2e dan 2f, dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahun. Tidak ada unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI). Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dibentuk unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (*road map*) yang telah dicanangkan.

b. Visi dan Misi DJPK

1) Visi

Visi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah "Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil dan Transparan."

2) Misi

Misi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.
- c) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.
- d) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Struktur Organisasi DJPK

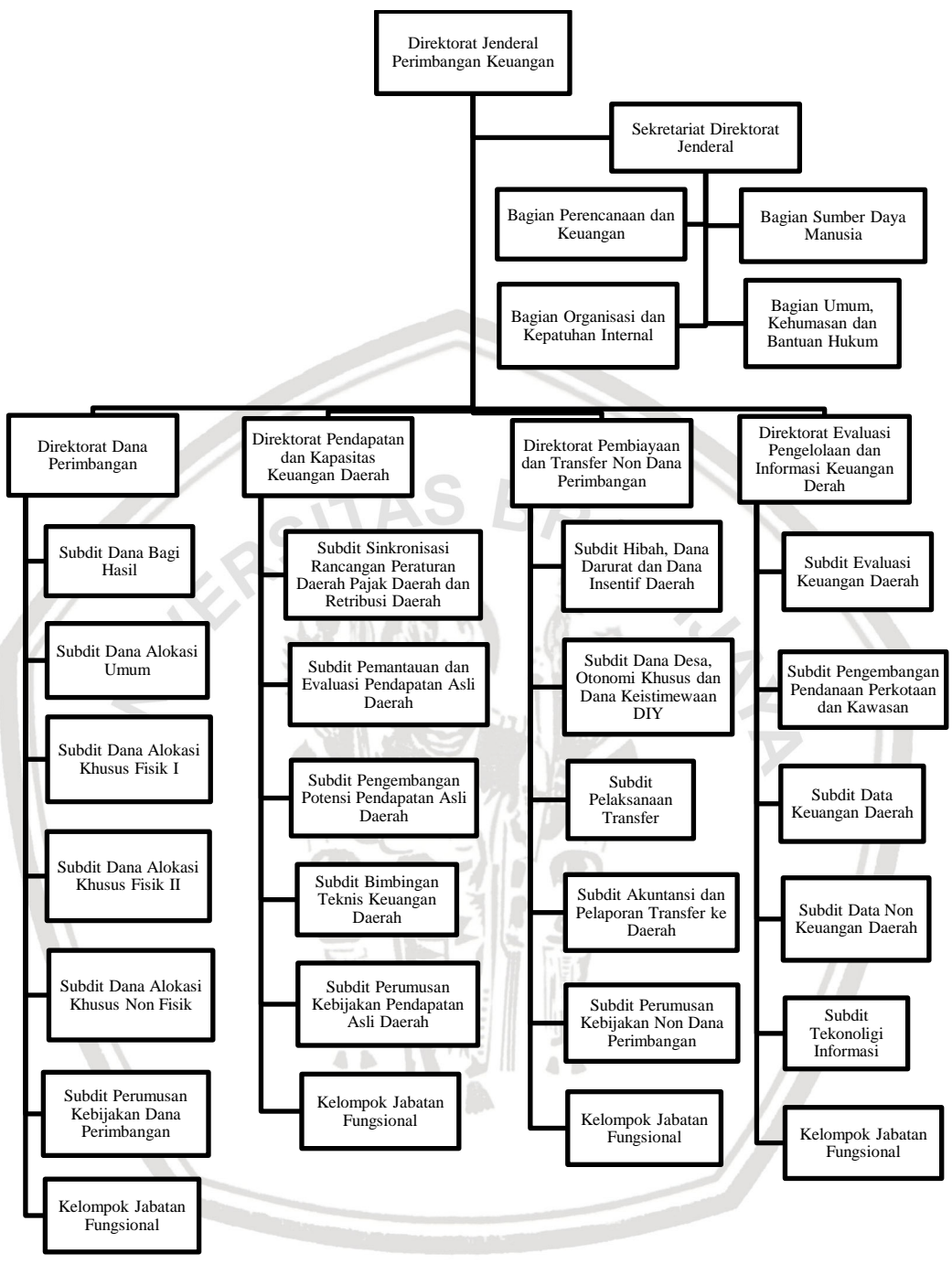
Struktur Organisasi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia terdiri atas:

- 1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal
 - a) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
 - c) Bagian Sumber Daya Manusia

- d) Bagian Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum
- 3) Direktorat Dana Perimbangan
 - a) Subdit Dana Bagi Hasil
 - b) Subdit Dana Alokasi Umum
 - c) Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik I
 - d) Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik II
 - e) Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - f) Subdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
 - a) Subdit Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b) Subdit Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
 - c) Subdit Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah
 - d) Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
 - e) Subdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
 - a) Subdit Hibah, Dana Darurat dan Dana Insentif Daerah
 - b) Subdit Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
 - c) Subdit Pelaksanaan Transfer
 - d) Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
 - e) Subdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan

- f) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
 - a) Subdit Evaluasi Keuangan Daerah
 - b) Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan
 - c) Subdit Data Keuangan Daerah
 - d) Subdit Data Non Keuangan Daerah
 - e) Subdit Teknologi Informasi
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 4. Struktur Organisasi DJPK Kemenkeu RI

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018



d. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan DJPK

1) Tugas Pokok

DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2) Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3) Kewenangan

- a) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus).
- d) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah
- e) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah.
- f) Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

B. Penyajian dan Analisis Data Penelitian

1. Penyajian Data

a. Produk Domestik Regional Bruto

Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	PDRB (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	16.204.000.000.000	17.369.200.000.000	16.906.800.000.000
2	Kab. Banyuwangi	39.733.600.000.000	42.005.700.000.000	44.529.900.000.000
3	Kab. Blitar	18.967.300.000.000	19.920.200.000.000	20.925.500.000.000
4	Kab. Bojonegoro	39.039.400.000.000	39.934.800.000.000	46.892.800.000.000
5	Kab. Bondowoso	10.140.100.000.000	10.652.400.000.000	11.179.600.000.000
6	Kab. Gresik	71.314.200.000.000	76.336.000.000.000	81.360.400.000.000
7	Kab. Jember	39.519.200.000.000	41.971.700.000.000	44.222.600.000.000
8	Kab. Jombang	20.672.300.000.000	21.793.200.000.000	22.960.200.000.000
9	Kab. Kediri	21.733.500.000.000	22.890.000.000.000	24.007.700.000.000
10	Kab. Lamongan	19.848.800.000.000	21.099.900.000.000	22.316.900.000.000
11	Kab. Lumajang	16.949.600.000.000	17.851.900.000.000	18.676.900.000.000
12	Kab. Madiun	9.654.100.000.000	10.169.700.000.000	10.704.900.000.000
13	Kab. Magetan	9.792.600.000.000	10.291.700.000.000	10.823.900.000.000
14	Kab. Malang	37.547.700.000.000	39.724.700.000.000	41.952.100.000.000
15	Kab. Mojokerto	41.608.400.000.000	44.292.000.000.000	46.792.300.000.000
16	Kab. Nganjuk	13.456.000.000.000	14.142.900.000.000	14.875.400.000.000
17	Kab. Ngawi	10.094.000.000.000	10.681.000.000.000	11.223.100.000.000
18	Kab. Pacitan	8.157.600.000.000	8.582.200.000.000	9.019.500.000.000
19	Kab. Pamekasan	8.375.200.000.000	8.846.200.000.000	9.316.900.000.000
20	Kab. Pasuruan	75.044.000.000.000	80.105.400.000.000	84.415.700.000.000
21	Kab. Ponorogo	10.554.500.000.000	11.104.500.000.000	11.687.900.000.000
22	Kab. Probolinggo	17.808.900.000.000	18.682.200.000.000	19.571.000.000.000
23	Kab. Sampang	11.623.800.000.000	11.632.900.000.000	11.874.500.000.000
24	Kab. Sidoarjo	99.992.500.000.000	106.434.300.000.000	112.012.900.000.000
25	Kab. Situbondo	9.993.800.000.000	10.572.400.000.000	11.086.500.000.000
26	Kab. Sumenep	20.218.100.000.000	21.476.900.000.000	21.750.600.000.000

Lanjutan Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	PDRB (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
27	Kab. Trenggalek	9.496.700.000.000	9.998.500.000.000	10.501.600.000.000
28	Kab. Tuban	33.678.800.000.000	35.519.900.000.000	37.256.000.000.000
29	Kab. Tulungagung	20.164.300.000.000	21.265.200.000.000	22.326.600.000.000
30	Kota Batu	8.018.600.000.000	8.572.100.000.000	9.145.900.000.000
31	Kota Blitar	3.446.800.000.000	3.649.600.000.000	3.856.900.000.000
32	Kota Kediri	65.408.800.000.000	69.232.900.000.000	72.945.500.000.000
33	Kota Madiun	7.470.700.000.000	7.965.300.000.000	8.455.400.000.000
34	Kota Malang	37.547.700.000.000	39.724.700.000.000	41.952.100.000.000
35	Kota Mojokerto	3.566.700.000.000	3.774.600.000.000	3.991.400.000.000
36	Kota Pasuruan	4.315.100.000.000	4.561.300.000.000	4.813.300.000.000
37	Kota Probolinggo	5.911.300.000.000	6.261.900.000.000	6.628.800.000.000
38	Kota Surabaya	286.050.700.000.000	305.947.600.000.000	324.215.200.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

b. Jumlah Industri

Data Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	19	20	20
2	Kab. Banyuwangi	278	279	280

Lanjutan Tabel 3. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
3	Kab. Blitar	65	70	81
4	Kab. Bojonegoro	78	81	88
5	Kab. Bondowoso	73	78	81
6	Kab. Gresik	562	599	603
7	Kab. Jember	170	168	176
8	Kab. Jombang	145	155	161
9	Kab. Kediri	109	121	122
10	Kab. Lamongan	142	144	150
11	Kab. Lumajang	80	80	85
12	Kab. Madiun	19	21	24
13	Kab. Magetan	28	37	37
14	Kab. Malang	232	249	267
15	Kab. Mojokerto	213	247	270
16	Kab. Nganjuk	43	43	45
17	Kab. Ngawi	31	31	27
18	Kab. Pacitan	14	15	17
19	Kab. Pamekasan	67	74	75
20	Kab. Pasuruan	770	794	811
21	Kab. Ponorogo	28	28	34
22	Kab. Probolinggo	63	63	64
23	Kab. Sampang	21	22	25
24	Kab. Sidoarjo	946	953	978

Lanjutan Tabel 3. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
25	Kab. Situbondo	84	92	97
26	Kab. Sumenep	55	71	78
27	Kab. Trenggalek	45	45	46
28	Kab. Tuban	205	196	199
29	Kab. Tulungagung	190	182	188
30	Kota Batu	37	37	37
31	Kota Blitar	14	13	13
32	Kota Kediri	38	35	36
33	Kota Madiun	54	58	58
34	Kota Malang	258	259	269
35	Kota Mojokerto	61	61	63
36	Kota Pasuruan	62	65	63
37	Kota Probolinggo	45	45	47
38	Kota Surabaya	882	942	957

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

c. Jumlah Penduduk

Data Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	937.497	945.821	954.305
2	Kab. Banyuwangi	1.582.586	1.588.082	1.594.083
3	Kab. Blitar	1.136.701	1.140.793	1.145.396
4	Kab. Bojonegoro	1.227.704	1.232.386	1.236.607
5	Kab. Bondowoso	752.791	756.989	761.205
6	Kab. Gresik	1.227.101	1.241.613	1.259.313
7	Kab. Jember	2.381.400	2.394.608	2.407.115
8	Kab. Jombang	1.230.881	1.234.501	1.240.985
9	Kab. Kediri	1.530.504	1.538.929	1.546.883
10	Kab. Lamongan	1.186.382	1.187.084	1.187.795
11	Kab. Lumajang	1.023.818	1.026.378	1.030.193
12	Kab. Madiun	671.883	673.988	676.087
13	Kab. Magetan	625.703	626.614	627.413
14	Kab. Malang	2.508.698	2.527.087	2.544.315
15	Kab. Mojokerto	1.057.808	1.070.486	1.080.389
16	Kab. Nganjuk	1.033.597	1.037.723	1.041.716
17	Kab. Ngawi	824.587	827.829	828.783
18	Kab. Pacitan	547.917	549.481	550.986
19	Kab. Pamekasan	827.407	836.224	845.314
20	Kab. Pasuruan	1.556.711	1.569.507	1.581.787
21	Kab. Ponorogo	863.890	865.809	867.393
22	Kab. Probolinggo	1.123.204	1.132.690	1.140.480

Lanjutan Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
23	Kab. Sampang	913.499	925.911	936.801
24	Kab. Sidoarjo	2.040.968	2.083.924	2.117.279
25	Kab. Situbondo	660.702	666.013	669.713
26	Kab. Sumenep	1.061.211	1.067.202	1.072.113
27	Kab. Trenggalek	683.791	686.781	689.200
28	Kab. Tuban	1.141.497	1.141.097	1.152.915
29	Kab. Tulungagung	1.009.411	1.015.974	1.021.190
30	Kota Batu	196.189	198.608	200.485
31	Kota Blitar	135.702	136.903	137.908
32	Kota Kediri	276.619	278.072	280.004
33	Kota Madiun	174.114	174.373	174.995
34	Kota Malang	840.803	845.973	851.298
35	Kota Mojokerto	123.805	124.719	125.706
36	Kota Pasuruan	192.285	193.329	194.815
37	Kota Probolinggo	223.881	226.777	229.013
38	Kota Surabaya	2.821.929	2.833.924	2.848.583

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

d. Penerimaan Pajak Reklame

Data Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 5. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	923.992.317	803.178.709	535.993.123
2	Kab. Banyuwangi	2.157.384.879	2.189.877.851	2.222.370.823
3	Kab. Blitar	3.040.662.525	1.762.015.684	483.368.842
4	Kab. Bojonegoro	1.614.845.263	1.618.577.421	161.053.732
5	Kab. Bondowoso	263.215.081	339.417.305	290.827.354
6	Kab. Gresik	149.599.373.143	2.879.402.658	156.027.125
7	Kab. Jember	6.141.451.314	5.408.722.902	315.264.552
8	Kab. Jombang	73.652.887.249	1.313.977.640	1.483.133.620
9	Kab. Kediri	1.249.992.038	1.273.896.087	1.626.307.931
10	Kab. Lamongan	1.188.838.775	2.461.379.512	1.770.941.888
11	Kab. Lumajang	758.816.420	425.609.830	92.403.240
12	Kab. Madiun	3.155.626.134	383.699.260	386.883.636
13	Kab. Magetan	3.684.588.900	373.090.314	9.314.375
14	Kab. Malang	10.716.211.079	5.524.019.905	331.828.731
15	Kab. Mojokerto	10.084.391.809	5.103.521.130	122.650.450
16	Kab. Nganjuk	576.384.573	626.692.485	773.056.025
17	Kab. Ngawi	512.884.425	567.032.622	621.180.820
18	Kab. Pacitan	417.332.538	931.650.350	440.595.950
19	Kab. Pamekasan	65.114.703.544	581.469.919	14.245.204
20	Kab. Pasuruan	2.068.180.898	2.163.698.431	2.289.578.792
21	Kab. Ponorogo	822.633.351	887.083.240	53.244.650
22	Kab. Probolinggo	872.083.100	823.746.283	775.409.467
23	Kab. Sampang	660.783.775	841.256.121	1.021.728.467
24	Kab. Sidoarjo	8.900.173.479	4.761.962.109	485.213.764

Lanjutan Tabel 5. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
25	Kab. Situbondo	9.058.621.840	962.571.612	13.743.750
26	Kab. Sumenep	3.806.313.301	2.042.932.512	279.551.723
27	Kab. Trenggalek	626.332.287	235.315.483	89.605.020
28	Kab. Tuban	5.646.536.310	717.516.404	53.755.475
29	Kab. Tulungagung	961.809.323	610.873.416	112.646.620
30	Kota Batu	538.970.899	504.821.136	470.671.373
31	Kota Blitar	291.192.439	180.269.820	421.847.102
32	Kota Kediri	1.674.670.730	1.759.204.185	1.843.737.640
33	Kota Madiun	2.568.333.345	2.603.825.753	2.639.318.160
34	Kota Malang	10.716.211.079	5.524.019.905	331.828.731
35	Kota Mojokerto	1.224.403.176	709.239.126	194.075.075
36	Kota Pasuruan	843.743.801	471.248.844	98.753.886
37	Kota Probolinggo	799.792.561	861.011.615	922.230.669
38	Kota Surabaya	106.146.474.640	124.300.629.650	115.749.218.725

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2018

2. Uji Statistik Deskriptif

Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009:206-207) dijelaskan bahwa statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus,

median, mean, perhitungan desit, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi serta perhitungan persentase.

a. Produk Domestik Regional Bruto (X_1)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:337-338) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB menggunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	PDRB (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	16.204.000.000.000	17.369.200.000.000	16.906.800.000.000
2	Kab. Banyuwangi	39.733.600.000.000	42.005.700.000.000	44.529.900.000.000
3	Kab. Blitar	18.967.300.000.000	19.920.200.000.000	20.925.500.000.000
4	Kab. Bojonegoro	39.039.400.000.000	39.934.800.000.000	46.892.800.000.000
5	Kab. Bondowoso	10.140.100.000.000	10.652.400.000.000	11.179.600.000.000
6	Kab. Gresik	71.314.200.000.000	76.336.000.000.000	81.360.400.000.000
7	Kab. Jember	39.519.200.000.000	41.971.700.000.000	44.222.600.000.000
8	Kab. Jombang	20.672.300.000.000	21.793.200.000.000	22.960.200.000.000
9	Kab. Kediri	21.733.500.000.000	22.890.000.000.000	24.007.700.000.000
10	Kab. Lamongan	19.848.800.000.000	21.099.900.000.000	22.316.900.000.000
11	Kab. Lumajang	16.949.600.000.000	17.851.900.000.000	18.676.900.000.000
12	Kab. Madiun	9.654.100.000.000	10.169.700.000.000	10.704.900.000.000
13	Kab. Magetan	9.792.600.000.000	10.291.700.000.000	10.823.900.000.000

Lanjutan Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	PDRB (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
14	Kab. Malang	37.547.700.000.000	39.724.700.000.000	41.952.100.000.000
15	Kab. Mojokerto	41.608.400.000.000	44.292.000.000.000	46.792.300.000.000
16	Kab. Nganjuk	13.456.000.000.000	14.142.900.000.000	14.875.400.000.000
17	Kab. Ngawi	10.094.000.000.000	10.681.000.000.000	11.223.100.000.000
18	Kab. Pacitan	8.157.600.000.000	8.582.200.000.000	9.019.500.000.000
19	Kab. Pamekasan	8.375.200.000.000	8.846.200.000.000	9.316.900.000.000
20	Kab. Pasuruan	75.044.000.000.000	80.105.400.000.000	84.415.700.000.000
21	Kab. Ponorogo	10.554.500.000.000	11.104.500.000.000	11.687.900.000.000
22	Kab. Probolinggo	17.808.900.000.000	18.682.200.000.000	19.571.000.000.000
23	Kab. Sampang	11.623.800.000.000	11.632.900.000.000	11.874.500.000.000
24	Kab. Sidoarjo	99.992.500.000.000	106.434.300.000.000	112.012.900.000.000
25	Kab. Situbondo	9.993.800.000.000	10.572.400.000.000	11.086.500.000.000
26	Kab. Sumenep	20.218.100.000.000	21.476.900.000.000	21.750.600.000.000
27	Kab. Trenggalek	9.496.700.000.000	9.998.500.000.000	10.501.600.000.000
28	Kab. Tuban	33.678.800.000.000	35.519.900.000.000	37.256.000.000.000
29	Kab. Tulungagung	20.164.300.000.000	21.265.200.000.000	22.326.600.000.000
30	Kota Batu	8.018.600.000.000	8.572.100.000.000	9.145.900.000.000
31	Kota Blitar	3.446.800.000.000	3.649.600.000.000	3.856.900.000.000
32	Kota Kediri	65.408.800.000.000	69.232.900.000.000	72.945.500.000.000
33	Kota Madiun	7.470.700.000.000	7.965.300.000.000	8.455.400.000.000
34	Kota Malang	37.547.700.000.000	39.724.700.000.000	41.952.100.000.000
35	Kota Mojokerto	3.566.700.000.000	3.774.600.000.000	3.991.400.000.000
36	Kota Pasuruan	4.315.100.000.000	4.561.300.000.000	4.813.300.000.000
37	Kota Probolinggo	5.911.300.000.000	6.261.900.000.000	6.628.800.000.000
38	Kota Surabaya	286.050.700.000.000	305.947.600.000.000	324.215.200.000.000
Rata-rata Per Tahun		31.134.721.052.632	33.027.305.263.158	34.925.663.157.895

Lanjutan Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	PDRB (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
Rata-rata Seluruh Tahun		33.078.293.859.649		
Nilai Minimum Per Tahun		3.446.800.000.000	3.649.600.000.000	3.856.900.000.000
Nilai Minimum Seluruh Tahun		3.446.800.000.000		
Nilai Maksimum Per Tahun		286.050.700.000.000	305.947.600.000.000	324.215.200.000.000
Nilai Maksimum Seluruh Tahun		324.215.200.000.000		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013 Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah Rp.31.134.721.052.632,-, sedangkan selama tahun 2014 sebesar Rp.33.027.305.263.158,- dan selama tahun 2015 sebesar Rp.34.925.663.157.895,-. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Blitar yaitu sejumlah Rp.3.446.800.000.000,- pada tahun 2013, kemudian sejumlah Rp.3.649.600.000.000,- pada tahun 2014 dan sejumlah Rp.3.856.900.000.000,-. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling tinggi selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sejumlah Rp.286.050.700.000.000,- pada tahun 2013, kemudian sejumlah Rp.305.947.600.000.000,- pada tahun 2014 dan sejumlah Rp.324.215.200.000.000,-.

b. Jumlah Industri (X_2)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016:180) menyatakan bahwa industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Data Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	19	20	20
2	Kab. Banyuwangi	278	279	280
3	Kab. Blitar	65	70	81
4	Kab. Bojonegoro	78	81	88
5	Kab. Bondowoso	73	78	81
6	Kab. Gresik	562	599	603
7	Kab. Jember	170	168	176
8	Kab. Jombang	145	155	161
9	Kab. Kediri	109	121	122
10	Kab. Lamongan	142	144	150
11	Kab. Lumajang	80	80	85

Lanjutan Tabel 7. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
12	Kab. Madiun	19	21	24
13	Kab. Magetan	28	37	37
14	Kab. Malang	232	249	267
15	Kab. Mojokerto	213	247	270
16	Kab. Nganjuk	43	43	45
17	Kab. Ngawi	31	31	27
18	Kab. Pacitan	14	15	17
19	Kab. Pamekasan	67	74	75
20	Kab. Pasuruan	770	794	811
21	Kab. Ponorogo	28	28	34
22	Kab. Probolinggo	63	63	64
23	Kab. Sampang	21	22	25
24	Kab. Sidoarjo	946	953	978
25	Kab. Situbondo	84	92	97
26	Kab. Sumenep	55	71	78
27	Kab. Trenggalek	45	45	46
28	Kab. Tuban	205	196	199
29	Kab. Tulungagung	190	182	188
30	Kota Batu	37	37	37
31	Kota Blitar	14	13	13
32	Kota Kediri	38	35	36
33	Kota Madiun	54	58	58

Lanjutan Tabel 7. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Industri (dalam unit)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
34	Kota Malang	258	259	269
35	Kota Mojokerto	61	61	63
36	Kota Pasuruan	62	65	63
37	Kota Probolinggo	45	45	47
38	Kota Surabaya	882	942	957
Rata-rata Per Tahun		164	170	176
Rata-rata Seluruh Tahun		169		
Nilai Minimum Per Tahun		14	13	13
Nilai Minimum Seluruh Tahun		13		
Nilai Maksimum Per Tahun		946	953	978
Nilai Maksimum Seluruh Tahun		978		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013 Rata-rata Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah 164 unit, sedangkan tahun 2014 sejumlah 170 unit dan tahun 2015 sejumlah 176 unit. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Blitar yaitu sejumlah 14 unit pada tahun 2013, kemudian sejumlah 13 unit pada tahun 2014 dan 2015. Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling tinggi selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Sidoarjo yaitu sejumlah 946 unit pada tahun 2013, kemudian sejumlah 953 unit pada tahun 2014 dan sejumlah 978 pada tahun 2015.

c. Jumlah Penduduk (X₃)

Badan Pusat Statistik (2016:35-36) Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Data Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	937.497	945.821	954.305
2	Kab. Banyuwangi	1.582.586	1.588.082	1.594.083
3	Kab. Blitar	1.136.701	1.140.793	1.145.396
4	Kab. Bojonegoro	1.227.704	1.232.386	1.236.607
5	Kab. Bondowoso	752.791	756.989	761.205
6	Kab. Gresik	1.227.101	1.241.613	1.259.313
7	Kab. Jember	2.381.400	2.394.608	2.407.115
8	Kab. Jombang	1.230.881	1.234.501	1.240.985
9	Kab. Kediri	1.530.504	1.538.929	1.546.883
10	Kab. Lamongan	1.186.382	1.187.084	1.187.795
11	Kab. Lumajang	1.023.818	1.026.378	1.030.193
12	Kab. Madiun	671.883	673.988	676.087
13	Kab. Magetan	625.703	626.614	627.413
14	Kab. Malang	2.508.698	2.527.087	2.544.315
15	Kab. Mojokerto	1.057.808	1.070.486	1.080.389

**Lanjutan Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Tahun 2013-2015**

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
16	Kab. Nganjuk	1.033.597	1.037.723	1.041.716
17	Kab. Ngawi	824.587	827.829	828.783
18	Kab. Pacitan	547.917	549.481	550.986
19	Kab. Pamekasan	827.407	836.224	845.314
20	Kab. Pasuruan	1.556.711	1.569.507	1.581.787
21	Kab. Ponorogo	863.890	865.809	867.393
22	Kab. Probolinggo	1.123.204	1.132.690	1.140.480
23	Kab. Sampang	913.499	925.911	936.801
24	Kab. Sidoarjo	2.040.968	2.083.924	2.117.279
25	Kab. Situbondo	660.702	666.013	669.713
26	Kab. Sumenep	1.061.211	1.067.202	1.072.113
27	Kab. Trenggalek	683.791	686.781	689.200
28	Kab. Tuban	1.141.497	1.141.097	1.152.915
29	Kab. Tulungagung	1.009.411	1.015.974	1.021.190
30	Kota Batu	196.189	198.608	200.485
31	Kota Blitar	135.702	136.903	137.908
32	Kota Kediri	276.619	278.072	280.004
33	Kota Madiun	174.114	174.373	174.995
34	Kota Malang	840.803	845.973	851.298
35	Kota Mojokerto	123.805	124.719	125.706
36	Kota Pasuruan	192.285	193.329	194.815

Lanjutan Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
37	Kota Probolinggo	223.881	226.777	229.013
38	Kota Surabaya	2.821.929	2.833.924	2.848.583
Rata-rata Per Tahun		1.009.347	1.015.900	1.022.383
Rata-rata Seluruh Tahun		1.002.851		
Nilai Minimum Per Tahun		123.805	124.719	125.706
Nilai Minimum Seluruh Tahun		123.805		
Nilai Maksimum Per Tahun		2.821.929	2.833.924	2.848.583
Nilai Maksimum Seluruh Tahun		2.848.583		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013 Rata-rata Jumlah Penduduk di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah 1.009.347 jiwa, sedangkan selama tahun 2014 sejumlah 1.015.900 jiwa dan selama tahun 2015 sejumlah 1.022.383 jiwa . Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Mojokerto yaitu sejumlah 123.805 jiwa pada tahun 2013, kemudian sejumlah 124.719 jiwa pada tahun 2014 dan sejumlah 125.706 jiwa pada tahun 2015. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling tinggi selama tahun 2013 hingga 2015 dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sejumlah 2.821.929 jiwa pada tahun 2013, kemudian sejumlah 2.833.924 jiwa pada tahun 2014 dan sejumlah 2.848.583 jiwa pada tahun 2015.

d. Penerimaan Pajak Reklame (Y)

Dalam buku yang ditulis oleh Priantara (2016:562) dijelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Data Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel 9. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
1	Kab. Bangkalan	923.992.317	803.178.709	535.993.123
2	Kab. Banyuwangi	2.157.384.879	2.189.877.851	2.222.370.823
3	Kab. Blitar	3.040.662.525	1.762.015.684	483.368.842
4	Kab. Bojonegoro	1.614.845.263	1.618.577.421	161.053.732
5	Kab. Bondowoso	263.215.081	339.417.305	290.827.354
6	Kab. Gresik	149.599.373.143	2.879.402.658	156.027.125
7	Kab. Jember	6.141.451.314	5.408.722.902	315.264.552
8	Kab. Jombang	73.652.887.249	1.313.977.640	1.483.133.620
9	Kab. Kediri	1.249.992.038	1.273.896.087	1.626.307.931
10	Kab. Lamongan	1.188.838.775	2.461.379.512	1.770.941.888
11	Kab. Lumajang	758.816.420	425.609.830	92.403.240

Lanjutan Tabel 9. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
12	Kab. Madiun	3.155.626.134	383.699.260	386.883.636
13	Kab. Magetan	3.684.588.900	373.090.314	9.314.375
14	Kab. Malang	10.716.211.079	5.524.019.905	331.828.731
15	Kab. Mojokerto	10.084.391.809	5.103.521.130	122.650.450
16	Kab. Nganjuk	576.384.573	626.692.485	773.056.025
17	Kab. Ngawi	512.884.425	567.032.622	621.180.820
18	Kab. Pacitan	417.332.538	931.650.350	440.595.950
19	Kab. Pamekasan	65.114.703.544	581.469.919	14.245.204
20	Kab. Pasuruan	2.068.180.898	2.163.698.431	2.289.578.792
21	Kab. Ponorogo	822.633.351	887.083.240	53.244.650
22	Kab. Probolinggo	872.083.100	823.746.283	775.409.467
23	Kab. Sampang	660.783.775	841.256.121	1.021.728.467
24	Kab. Sidoarjo	8.900.173.479	4.761.962.109	485.213.764
25	Kab. Situbondo	9.058.621.840	962.571.612	13.743.750
26	Kab. Sumenep	3.806.313.301	2.042.932.512	279.551.723
27	Kab. Trenggalek	626.332.287	235.315.483	89.605.020
28	Kab. Tuban	5.646.536.310	717.516.404	53.755.475
29	Kab. Tulungagung	961.809.323	610.873.416	112.646.620
30	Kota Batu	538.970.899	504.821.136	470.671.373
31	Kota Blitar	291.192.439	180.269.820	421.847.102
32	Kota Kediri	1.674.670.730	1.759.204.185	1.843.737.640
33	Kota Madiun	2.568.333.345	2.603.825.753	2.639.318.160
34	Kota Malang	10.716.211.079	5.524.019.905	331.828.731
35	Kota Mojokerto	1.224.403.176	709.239.126	194.075.075

Lanjutan Tabel 9. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015

No	Nama Daerah	Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)		
		Th.2013	Th.2014	Th.2015
37	Kota Probolinggo	799.792.561	861.011.615	922.230.669
38	Kota Surabaya	106.146.474.640	124.300.629.650	115.749.218.725
Rata-rata Per Tahun		12.975.811.641	4.882.327.822	3.675.884.382
Rata-rata Seluruh Tahun		7.092.293.980		
Nilai Minimum Per Tahun		263.215.081	180.269.820	9.314.375
Nilai Minimum Seluruh Tahun		9.314.375		
Nilai Maksimum Per Tahun		149.599.373.143	124.300.629.650	115.749.218.725
Nilai Maksimum Seluruh Tahun		149.599.373.143		

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2018

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013 Rata-rata Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah Rp.12.975.811.641,-, sedangkan selama tahun 2014 sejumlah Rp.4.882.327.822,- dan selama tahun 2015 sejumlah Rp.3.675.884.382,-. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah pada tahun 2013 dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso yaitu sejumlah Rp.263.215.081,-, sedangkan pada tahun 2014 dimiliki oleh Kota Blitar yaitu sejumlah Rp.180.269.820,- dan pada tahun 2015 dimiliki oleh Kabupaten Magetan yaitu sejumlah Rp.9.314.375,-. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling tinggi pada tahun 2013 dimiliki oleh Kabupaten Gresik yaitu sejumlah Rp.149.599.373.143,-, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sejumlah Rp.124.300.629.650,- dan Rp.115.749.218.725,-.

Berikut hasil Uji Statistik Deskriptif dengan menggunakan bantuan *software SPSS* versi 21:

Tabel 10. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
PDRB	114	3.446.800.000.000	324.215.200.000.000	33.078.293.859.649
JI	114	13	978	169
JP	114	123.805	2.848.583	1.002.851
PPR	114	9.314.375	149.599.373.143	7.092.293.980
Valid N (listwise)	114			

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa selama tahun 2013 hingga 2015 Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah Rp.33.078.293.859.649,-. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah dimiliki oleh Kota Blitar yaitu sejumlah Rp.3.446.800.000.000,-, sedangkan yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sejumlah Rp.324.215.200.000.000,-. Rata-rata Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah 169 unit. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah dimiliki oleh Kota Blitar yaitu sejumlah 13 unit, sedangkan yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Sidoarjo yaitu sejumlah 978 unit.

Rata-rata Jumlah Penduduk di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sejumlah 1.002.851 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah dimiliki oleh Kota Mojokerto yaitu sejumlah 123.805 jiwa, sedangkan yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sejumlah 2.848.583 jiwa. Rata-rata Penerimaan Pajak Reklame di Kota Batu sejumlah

Rp.7.092.293.980,-. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Jawa Timur paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Magetan yaitu sejumlah Rp.9.314.375,-, sedangkan yang paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Gresik yaitu sejumlah Rp.149.599.373.143,-.

3. Uji Statistik Inferensial

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam buku yang ditulis oleh Yamin (2014:82) dijelaskan bahwa Analisis Regresi Linier Berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara Variabel Terikat (Y) dengan satu atau lebih Variabel Bebas (X). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksikan nilai output berdasarkan nilai input tertentu. Dapat diketahui dengan Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Bebas (X) yang benar-benar signifikan mempengaruhi Variabel Terikat (Y). Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan *software SPSS* versi 21 sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,180	5,045		-1,820	,072
	PDRB	,768	,225	,438	3,405	,001
	JI	,351	,151	,225	2,330	,022
	JP	,382	,182	,198	2,102	,038

a. Dependent Variable: PPR

Sumber: Hasil olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui persamaan regresi dan analisis sebagai berikut:

$$Y = -9,180 + 0,438 \text{ PDRB} + 0,225 \text{ JI} + 0,198 \text{ JP}$$

- 1) Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau X_1 sebesar 0,438 menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan variabel X_1 terhadap Penerimaan Pajak Reklame atau Y . Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,438 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 2) Koefisien Jumlah Industri (JI) atau X_2 sebesar 0,225 menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan variabel X_2 terhadap Y . Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel X_2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) Koefisien Jumlah Penduduk (JP) atau X_3 sebesar 0,198 menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan variabel X_3 terhadap Y . Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel X_3 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,198 dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:118-125) dijelaskan bahwa Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model

regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Residual adalah nilai selisih antara Variabel Y dengan Variabel Y yang diprediksikan. Dalam metode regresi linier, hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai *random error*(e) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal sehingga data layak untuk diuji secara statistik. Uji Normalitas pada regresi menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov*. Pengambilan keputusan untuk metode *One Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika signifikansi $> 0,05$ maka data residual berdistribusi normal dan jika signifikansi $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal. Hasil Uji Normalitas menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software SPSS* versi 21 sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000009
	Std. Deviation	17072964885,1 2100600
Most Extreme Differences	Absolute	,372
	Positive	,372
	Negative	-,205
Kolmogorov-Smirnov Z		3,968
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan hasil Uji Normalitas menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software SPSS* versi 21 pada tabel 12 menunjukkan

residual sebesar 0,000 atau signifikansi $< 0,05$, maka residual tidak terdistribusi secara normal. Dalam buku yang ditulis oleh Ghozali (2016:34) dijelaskan bahwa data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi supaya menjadi normal. Bentuk transformasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LN. Setelah dilakukan transformasi didapatkan hasil Uji Normalitas menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software SPSS* versi 21 sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,05152739
	Absolute	,058
Most Extreme Differences	Positive	,058
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,843

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan hasil Uji Normalitas setelah dilakukan transformasi dalam bentuk LN menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software SPSS* versi 21 pada tabel 13 menunjukkan residual sebesar 0,843 atau signifikansi $> 0,05$, maka residual terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:129-131) menerangkan bahwa Uji Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel atau

lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah multikolinieritas. Cara mendeteksi ada tidak multikolinieritas umumnya dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*(*VIF*) pada hasil regresi linier. Pengambilan keputusan yaitu jika *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil Uji Multikolinieritas dengan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-9,180	5,045			
	PDRB	,768	,225	,438	,209	4,775
	JI	,351	,151	,225	,371	2,698
	JP	,382	,182	,198	,389	2,569

a. Dependent Variable: PPR

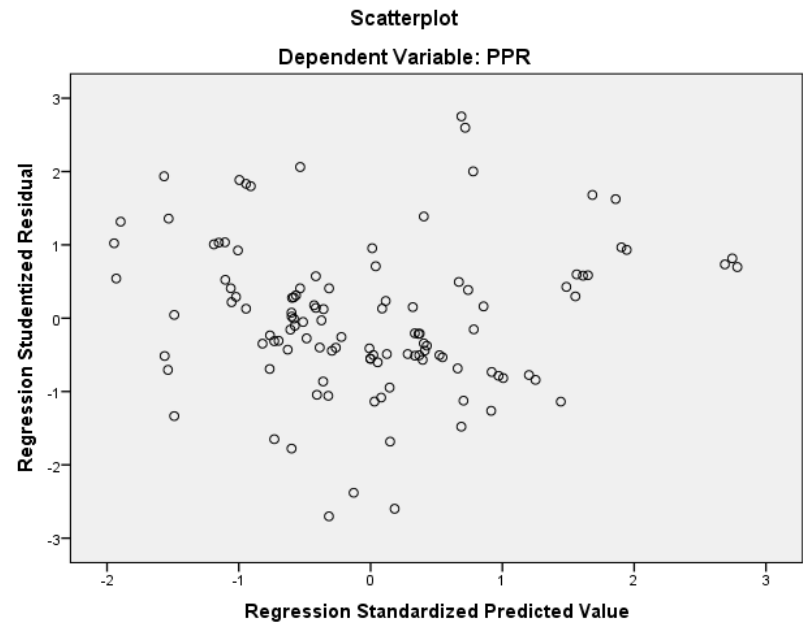
Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan bantuan *software SPSS* pada tabel 14 menunjukkan nilai *Tolerance* dan *VIF* Produk Domestik Regional Bruto (X_1) sebesar 0,209 dan 4,775 artinya *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Nilai *Tolerance* dan *VIF* Jumlah Industri (X_2) sebesar 0,371 dan 2,698 artinya *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Nilai *Tolerance* dan *VIF* Jumlah Penduduk (X_3) sebesar 0,389 dan 2,569 artinya *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, sehingga Uji Multikolinieritas telah terpenuhi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam buku yang ditulis oleh Ghozali (2016:134-138) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam hal *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidak Heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatterplot* dan Uji Glejser.

Dasar pengambilan keputusan grafik *Scatterplot* jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi Heteroskedastisitas. Dalam hal tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan Uji Glejser dengan melihat apabila nilai signifikan variabel independen apabila lebih dari 5% dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas, apabila kurang dari 5% maka terjadi heteroskedastisitas.. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan metode *Scatterplot* dan Uji Glejser dengan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Uji Scatterplot
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2018

Tabel 15. Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,481	3,135		,791	,430
1 PDRB	-,014	,140	-,020	-,099	,922
JI	,162	,094	,264	1,727	,087
JP	-,145	,113	-,192	-1,288	,201

a. Dependent Variable: Absolute Residual

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel independen lebih dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



4) Uji Autokorelasi

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:139-142) menerangkan bahwa Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi. Cara mendeteksi ada tidak autokorelasi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*), yaitu dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* hasil dari regresi dengan nilai *Durbin-Watson* tabel. Pengambilan keputusan Uji *Durbin-Watson* yaitu jika $dU < DW < 4-dU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi). Dalam hal $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi). Dalam hal $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW < 4-dL$ maka tidak ada keputusan yang pasti. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* (*DW test*) dengan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 ^a	,619	,609	1,06577	1,794

a. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

b. Dependent Variable: PPR

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan tabel 16 menunjukkan nilai DW sebesar 1,794. Dari tabel distribusi *Durbin-Watson* ($n=114$ dan $k=3$) diketahui nilai dL dan dU sebesar 1,6410 dan 1,7488, lalu nilai $4-dU$ sebesar $4 - 1,7488 = 2,2512$. Artinya

$1,7488 < 1,794 < 2,2512$ atau $dU < DW < 4-dU$, maka H_0 diterima dan tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Dalam buku yang ditulis oleh Ghozali (2016:95) menerangkan bahwa Uji Koefisien Determinasi ini untuk mengukur seberapa jauh model regresi berganda dalam menerangkan variasi Variabel Terikat (Y). Menggunakan *Model Summary* dapat diketahui interval nilai *Adjusted R Square* adalah 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan Variabel Bebas (X) dalam menjelaskan Variabel Terikat (Y) sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti Variabel Bebas (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi Variabel Terikat (Y). Hasil Uji Koefisien Determinasi menggunakan *Model Summary* dengan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 ^a	,619	,609	1,06577	1,794

a. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

b. Dependent Variable: PPR

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,609 atau 60,9% yang berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) mampu menjelaskan variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Sisa dari nilai tersebut sebesar 0,391 atau

39,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2) Uji Statistik F

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:63-65) Uji Statistik F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan besarnya nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Besar nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig. < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Besar nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig. > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil Uji Statistik F dengan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	202,962	3	67,654	59,562	,000 ^b
Residual	124,945	110	1,136		
Total	327,908	113			

a. Dependent Variable: PPR

b. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan nilai F_{hitung} dan signifikansi sebesar 59,562 dan 0,000, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,69 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi F (derajat bebas $N_1 = 3$ dan derajat bebas $N_2 = 110$). Artinya nilai $59,562 > 2,69$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk

(X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

3) Uji Statistik t

Dalam buku yang ditulis oleh Priyatno (2016:66-67) dijelaskan bahwa Uji Statistik t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan besaran nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Besar nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan Sig. $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Besar nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan Sig. $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Besar nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan Sig. $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan apabila $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan Sig. $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil Uji Statistik t menggunakan bantuan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-9,180	5,045		-1,820	,072
	PDRB	,768	,225	,438	3,405	,001
	JI	,351	,151	,225	2,330	,022
	JP	,382	,182	,198	2,102	,038

a. Dependent Variable: PPR

Sumber: Hasil Olahan *SPSS*, 2018

Berdasarkan tabel 19 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Hasil Uji Statistik t menjelaskan variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,405 dan nilai signifikansi sebesar

0,001, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t (derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Artinya nilai $3,405 > 1,98118$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

b) Hasil Uji Statistik t menjelaskan variabel Jumlah Industri (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,330 dan nilai signifikansi sebesar 0,022, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t (derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Artinya nilai $2,330 > 1,98118$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,022 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Industri (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

c) Hasil Uji Statistik t menjelaskan variabel Jumlah Penduduk (X_3) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,102 dan nilai signifikansi sebesar 0,038, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t (derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Artinya nilai $2,102 > 1,98118$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,038 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Hasil Hipotesis 1

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui hasil dari hipotesis 1. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Dari hasil Uji Statistik F diketahui nilai F_{hitung} dan F_{tabel} sebesar 59,562 dan 2,69, artinya hasil tersebut memenuhi syarat $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $59,562 > 2,69$. Dari Uji Statistik F juga diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut berada di bawah nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan pengaruh secara simultan dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3). Nilai *Adjusted R Square* yang didapatkan sebesar 0,609 atau 60,9% yang berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) mampu menjelaskan variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) sebesar 60,9%. Sisa dari nilai tersebut sebesar 0,391 atau 39,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, terdapat penelitian yang memiliki hasil yang sama yaitu penelitian Ulfiyah (2015) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

2. Hasil Hipotesis 2

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis 2. Pengujian hipotesis melalui Uji Statistik t menjelaskan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,405 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t (derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dari t_{tabel} atau $3,405 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (X_1) sebesar 0,438. Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) sebesar 0,438 dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil Uji Statistik t dan Analisis Regresi Linier Berganda sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan memberikan pengaruh karena salah satu

indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Dalam hal pendapatan seseorang semakin tinggi akan meningkatkan kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk Pajak Daerah. Didukung dengan Teori Fischer membahas tentang hubungan Pajak Daerah dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto. Fischer menyatakan bahwa terdapat tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah, meliputi pendapatan dan perusahaan, konsumsi dan kekayaan (Yogyandaru, 2013). Berdasarkan pendapat Fischer Pajak Reklame merupakan kategori pajak yang berbasis konsumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pajak Reklame (Fadly, 2016).

Penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian Tristianto *et al* (2015) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi apabila Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada seluruh jenis usaha menurun. Penurunan jenis usaha menimbulkan daya beli masyarakat dan ekonomi di daerah tersebut menurun juga. Kejadian tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak menjadi rendah.

3. Hasil Hipotesis 3

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis 3. Pengujian hipotesis melalui Uji Statistik t menjelaskan bahwa variabel Jumlah Industri (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,330 dan nilai signifikansi sebesar 0,022, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t

(derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dari t_{tabel} atau $2,330 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,022 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Industri (X_2) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Koefisien regresi Jumlah Industri (X_2) sebesar 0,225. Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Jumlah Industri (X_2) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil Uji Statistik t dan Analisis Regresi Linier Berganda sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfyah (2015) bahwa jumlah industri memberikan pengaruh karena semakin banyak industri yang bermunculan, maka permintaan pemasangan reklame untuk kegiatan promosi barang-barang juga akan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan permintaan pemasangan reklame meningkat, sehingga Penerimaan Pajak Reklame menjadi lebih besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisianto *et al* (2015) dijelaskan bahwa pertumbuhan Jumlah Industri membutuhkan sarana untuk memasarkan produk atau barang dengan cara memasang iklan atau reklame, sehingga mempengaruhi pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2017) dijelaskan bahwa pemasaran digunakan sebagai instrumen kebijakan suatu industri. Pemasaran tersebut adalah iklan atau reklame, sehingga objek Pajak Reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri. Peningkatan variasi produk

barang atau jasa akan meningkatkan objek Pajak Reklame, sehingga Penerimaan Pajak Reklame juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga didukung dengan Teori Schumpeter.

Teori Schumpeter menekankan peran penting pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha termasuk golongan yang selalu membuat pembaharu atau inovasi yang menguntungkan dalam kegiatan ekonomi. Pengusaha akan meminjam modal dan melakukan investasi, yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara, sehingga konsumsi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Peningkatan tersebut memacu sektor industri lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan investasi (Ulfiyah, 2015).

Penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian Fatah (2015) yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Industri (X_2) secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Hal tersebut dapat terjadi karena pajak yang dipungut dari suatu industri tidak hanya Pajak Reklame, akan tetapi juga termasuk Pajak Pusat yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu juga karena tidak semua industri memasang reklame, industri memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai keuntungan maksimum dengan tidak memasang reklame.

4. Hasil Hipotesis 4

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis 4. Pengujian hipotesis melalui Uji Statistik t menjelaskan bahwa variabel Jumlah Penduduk

(X_3) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,102 dan nilai signifikansi sebesar 0,038, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98118 dapat diketahui dengan melihat tabel distribusi t (derajat bebas = 113 dan Probabilitas = $\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$). Nilai t_{hitung} tersebut lebih kecil dari t_{tabel} atau $2,102 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,038 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_3) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y). Koefisien Jumlah Penduduk (X_3) sebesar 0,198. Koefisien variabel yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Jumlah Penduduk (X_3) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,198 dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil Uji Statistik t sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah (2015) bahwa Jumlah Penduduk memberikan pengaruh karena Jumlah Penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan menyebabkan pemilik industri tertarik untuk mendirikan industri baru. Semakin banyak industri, maka permintaan pemasangan reklame akan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan Penerimaan Pajak Reklame menjadi lebih besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatah (2015) dijelaskan bahwa semakin banyak Jumlah Penduduk menyebabkan banyak reklame dipasang supaya barang dan jasa yang ditawarkan dikenal oleh masyarakat. Pemasangan reklame yang terus meningkat mengakibatkan Penerimaan Pajak Reklame menjadi lebih besar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2017) dijelaskan bahwa Jumlah Penduduk mengalami fluktuasi, maka penduduk dengan usia produktif melakukan kegiatan atau usaha. Kegiatan atau usaha tersebut melakukan promosi melalui media reklame, sehingga Penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik. Dalam pandangan klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi.

Pakar ekonomi klasik lebih menekankan pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah Penduduk akan bertambah apabila tingkat upah naik, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat penawaran tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat *output* masyarakat. Dalam hal penduduk sedikit dan kekayaan alam berlebih, maka tingkat pengembalian modal dari investasi menjadi tinggi, sehingga pengusaha akan memperoleh keuntungan besar dan membuat investasi baru, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terwujud (Ulfiyah, 2015).

Penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan usaha-usaha perekonomian lebih banyak daripada pertumbuhan penduduk, sehingga penggunaan jasa reklame dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha-usaha perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Reklame pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan Variabel Bebas (X) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3). Variabel Terikat dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y). Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji Statistik F menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3). Variabel Terikat dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Reklame (Y) secara simultan. Pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} sebesar 59,562, F_{tabel} sebesar 2,69 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut sesuai dengan ketentuan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $59,562 > 2,69$ dan nilai signifikan lebih kecil dari α atau $0,000 < 0,05$. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,609 atau 60,9%. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kemampuan variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Jumlah Industri (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) untuk menjelaskan variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) adalah 60,9%. Sisa dari nilai tersebut sebesar 0,391 atau 39,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Statistik t untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar 3,405 dan 1,98118, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,405 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).
3. Hasil Uji Statistik t untuk variabel Jumlah Industri (X_2) terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar 2,330 dan 1,98118, dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,330 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,022 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Industri (X_2) secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).
4. Hasil Uji Statistik t untuk variabel Jumlah Penduduk (X_3) terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar 2,102 dan 1,98118, dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,102 > 1,98118$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0,038 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_3) secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Reklame (Y).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk mampu menjelaskan Penerimaan Pajak Reklame sebesar 60,9%, sedangkan sisanya sebesar 39,1% dijelaskan oleh faktor lain. Penelitian selanjutnya lebih baik mengembangkan Variabel Bebas dan Variabel Terikat yang lain seperti Pendapatan Per Kapita, Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, tidak hanya terbatas pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, misalnya dapat memperluas menjadi seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah atau Jawa Barat.
3. Melihat variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Reklame dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membuat kebijakan terkait Penerimaan Pajak Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Bungin, B. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Dara, A. & Bawono, I.R. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sriyana, J. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W & Endrayanto, P. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yamin, S & Kurniawan, H. 2014. *SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Infotek.

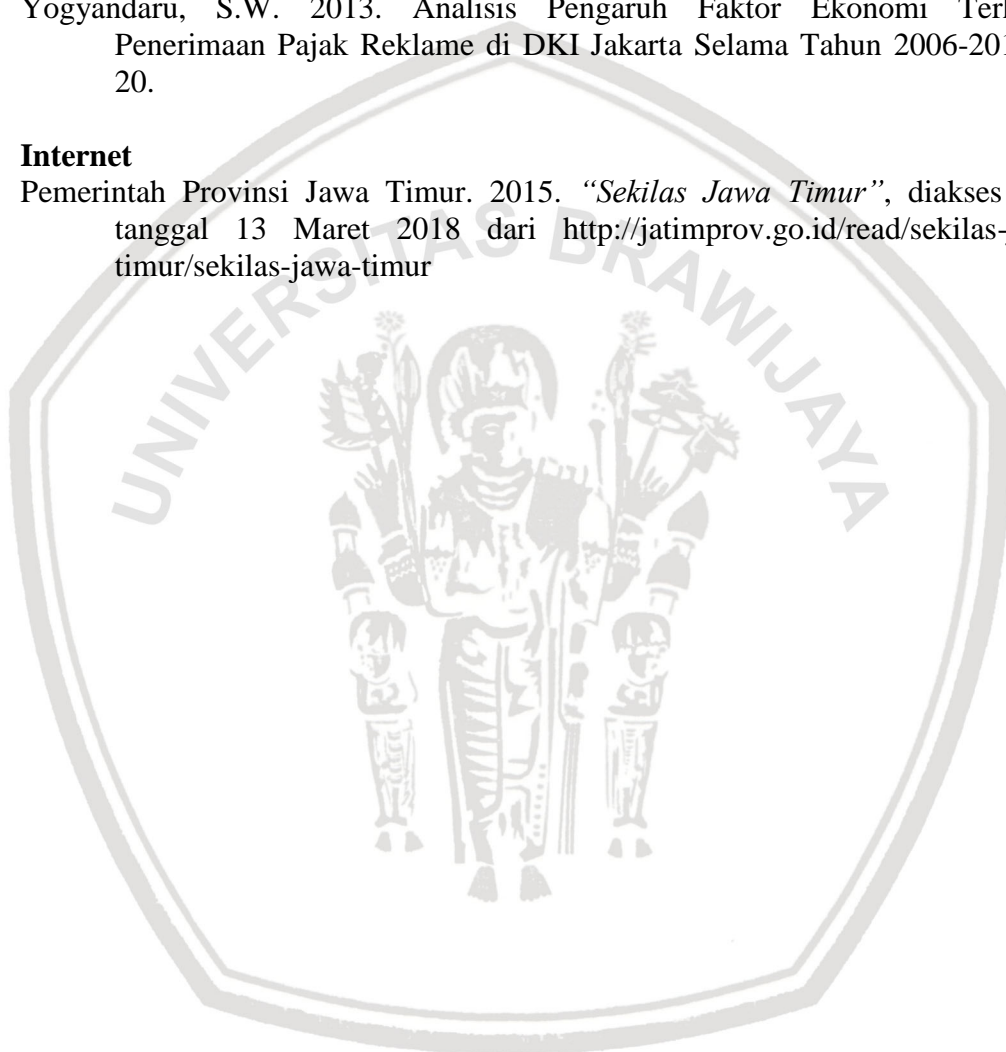
Jurnal

- Fatah, A.A. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame dan Efeknya Pada Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, 5(1): 1-9.
- Lengkong, T.I.M, Ilat, V & Wangkar, A. 2015. Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4): 89-99.
- Madina, R.I. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Regulasi Daerah Terkait Penerimaan Pajak Reklame. *Jurnal Perpajakan*, 6(2): 1-10.
- Putri, P.I. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Journal of Economics and Policy*, 6(2): 194-201.
- Ramadan, Y. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame dan Transparansi Pengelola Keuangan Daerah. *Akademika*, 15(1): 48-55.

- Sulistiyoningsih. 2014. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(8): 1-20.
- Trisianto, Arisman. A. & Fajriana, I. 2015. Pengaruh Jumlah Industri, PDRB dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. 1-10.
- Ulfiyah. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(11): 1-19.
- Yogyandaru, S.W. 2013. Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di DKI Jakarta Selama Tahun 2006-2010. 1-20.

Internet

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2015. "Sekilas Jawa Timur", diakses pada tanggal 13 Maret 2018 dari <http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pemberitahuan Informasi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON ((021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6348, 3500649; FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi

Tanggal : 12 Juli 2018

No. Pendaftaran : 177/PPID.KK/2018

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama : Ulva Novita Sari

Alamat : Dsn. Purwodai 02/01, Ds. Ngancar, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, Prov. Jatim

No. Telp/Fax/Email : 081232497880 / - / ulfanovit@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik*	<input type="checkbox"/> Tidak Tersedia <input checked="" type="checkbox"/> Tersedia
2.	Bentuk informasi yang tersedia*	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> /elektronik <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i>
3.	Waktu penyediaan	Hari
4.	Penjelasan/penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**(tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, didasarkan pada alasan sebagaimana penjelasan terlampir.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta tidak ada di Satuan Kerja kewenangan PPID.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan.

Jakarta, 20 Juli 2018

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
PPID Kementerian Keuangan

Nufransa Wira Sakti

Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

Lampiran 2. Data Variabel X_1 dan X_2

NAMA DAERAH	TAHUN	PDRB	JI	LN_PDRB	LN_JI
Kab. Bangkalan	2013	16.204.000.000.000	19	30,42	2,94
Kab. Banyuwangi	2013	39.733.600.000.000	278	31,31	5,63
Kab. Bondowoso	2013	10.140.100.000.000	73	29,95	4,29
Kab. Gresik	2013	71.314.200.000.000	562	31,90	6,33
Kab. Blitar	2013	18.967.300.000.000	65	30,57	4,17
Kab. Jember	2013	39.519.200.000.000	170	31,31	4,25
Kab. Bojonegoro	2013	39.039.400.000.000	78	31,30	4,36
Kab. Jombang	2013	20.672.300.000.000	145	32,42	4,98
Kab. Madiun	2013	9.654.100.000.000	19	29,90	2,94
Kab. Kediri	2013	21.733.500.000.000	109	30,71	4,69
Kab. Magetan	2013	9.792.600.000.000	28	29,91	3,33
Kab. Malang	2013	52.550.400.000.000	249	31,59	5,52
Kab. Lamongan	2013	19.848.800.000.000	142	30,62	4,96
Kab. Lumajang	2013	16.949.600.000.000	80	30,46	4,38
Kab. Mojokerto	2013	41.608.400.000.000	213	30,70	5,36
Kab. Pacitan	2013	8.157.600.000.000	14	29,73	2,64
Kab. Nganjuk	2013	13.456.000.000.000	43	30,23	3,76
Kab. Pasuruan	2013	75.044.000.000.000	770	31,95	6,65
Kab. Ngawi	2013	10.094.000.000.000	31	29,94	3,43
Kab. Sidoarjo	2013	99.992.500.000.000	946	32,24	6,85
Kab. Pamekasan	2013	8.375.200.000.000	67	29,76	4,20
Kab. Ponorogo	2013	10.554.500.000.000	28	29,99	3,33
Kab. Probolinggo	2013	17.808.900.000.000	63	30,51	4,14
Kab. Sampang	2013	11.623.800.000.000	21	30,08	3,04
Kab. Situbondo	2013	9.993.800.000.000	84	29,93	4,43
Kab. Sumenep	2013	20.218.100.000.000	55	30,64	4,01
Kab. Trenggalek	2013	9.496.700.000.000	45	29,88	3,81
Kab. Tuban	2013	33.678.800.000.000	205	31,15	5,32
Kab. Tulungagung	2013	20.164.300.000.000	190	30,63	5,25
Kota Batu	2013	8.018.600.000.000	37	29,71	3,61
Kota Blitar	2013	3.446.800.000.000	14	28,87	2,64
Kota Kediri	2013	65.408.800.000.000	38	31,81	4,06
Kota Madiun	2013	7.470.700.000.000	54	29,64	4,30
Kota Malang	2013	37.547.700.000.000	258	31,26	5,55
Kota Mojokerto	2013	3.566.700.000.000	61	28,90	4,11
Kota Pasuruan	2013	4.315.100.000.000	62	29,09	4,13
Kota Probolinggo	2013	5.911.300.000.000	45	29,41	3,81
Kota Surabaya	2013	286.050.700.000.000	882	33,29	6,78
Kab. Bangkalan	2014	17.369.200.000.000	20	30,49	3,00
Kab. Banyuwangi	2014	42.005.700.000.000	279	31,37	5,63
Kab. Blitar	2014	19.920.200.000.000	70	30,62	4,25
Kab. Bojonegoro	2014	39.934.800.000.000	81	31,32	4,39
Kab. Bondowoso	2014	10.652.400.000.000	78	30,00	4,36
Kab. Gresik	2014	76.336.000.000.000	599	31,97	6,40
Kab. Jember	2014	41.971.700.000.000	168	31,37	4,22
Kab. Jombang	2014	21.793.200.000.000	155	30,71	5,04
Kab. Kediri	2014	22.890.000.000.000	121	30,76	4,80
Kab. Lamongan	2014	21.099.900.000.000	144	30,68	4,97
Kab. Lumajang	2014	17.851.900.000.000	80	30,51	4,38

NAMA DAERAH	TAHUN	PDRB	JI	LN_PDRB	LN_JI
Kab. Madiun	2014	10.169.700.000.000	21	29,95	3,04
Kab. Magetan	2014	10.291.700.000.000	37	29,96	3,61
Kab. Malang	2014	55.317.800.000.000	267	31,64	5,59
Kab. Mojokerto	2014	44.292.000.000.000	247	31,42	5,51
Kab. Nganjuk	2014	14.142.900.000.000	43	30,28	3,76
Kab. Ngawi	2014	10.681.000.000.000	31	30,00	3,43
Kab. Pacitan	2014	8.582.200.000.000	15	29,78	2,71
Kab. Pamekasan	2014	8.846.200.000.000	74	29,81	3,99
Kab. Pasuruan	2014	80.105.400.000.000	794	32,01	6,68
Kab. Ponorogo	2014	11.104.500.000.000	28	30,04	3,33
Kab. Probolinggo	2014	18.682.200.000.000	63	30,56	4,14
Kab. Sampang	2014	11.632.900.000.000	22	30,08	3,09
Kab. Sidoarjo	2014	106.434.300.000.000	953	32,30	6,86
Kab. Situbondo	2014	10.572.400.000.000	92	29,99	4,52
Kab. Sumenep	2014	21.476.900.000.000	71	30,70	4,26
Kab. Trenggalek	2014	9.998.500.000.000	45	29,93	3,81
Kab. Tuban	2014	35.519.900.000.000	196	31,20	5,28
Kab. Tulungagung	2014	21.265.200.000.000	182	30,69	5,20
Kota Batu	2014	8.572.100.000.000	37	29,78	3,61
Kota Blitar	2014	3.649.600.000.000	13	28,93	2,56
Kota Kediri	2014	69.232.900.000.000	35	31,87	4,01
Kota Madiun	2014	7.965.300.000.000	58	29,71	4,36
Kota Malang	2014	39.724.700.000.000	259	31,31	5,56
Kota Mojokerto	2014	3.774.600.000.000	61	28,96	4,11
Kota Pasuruan	2014	4.561.300.000.000	65	29,15	4,17
Kota Probolinggo	2014	6.261.900.000.000	45	29,47	3,81
Kota Surabaya	2014	305.947.600.000.000	942	33,35	6,85
Kab. Tuban	2015	37.256.000.000.000	199	30,56	4,60
Kab. Trenggalek	2015	10.501.600.000.000	46	29,98	3,83
Kab. Lumajang	2015	18.676.900.000.000	85	30,56	3,91
Kab. Magetan	2015	10.823.900.000.000	37	30,01	3,61
Kota Pasuruan	2015	4.813.300.000.000	63	29,20	3,76
Kab. Tulungagung	2015	22.326.600.000.000	188	30,74	5,24
Kota Mojokerto	2015	3.991.400.000.000	63	29,02	4,14
Kab. Sumenep	2015	21.750.600.000.000	78	30,71	4,36
Kab. Bondowoso	2015	11.179.600.000.000	81	30,05	4,39
Kab. Madiun	2015	10.704.900.000.000	24	30,00	3,18
Kota Blitar	2015	3.856.900.000.000	13	28,98	2,56
Kab. Pacitan	2015	9.019.500.000.000	17	29,83	2,83
Kota Batu	2015	9.145.900.000.000	37	29,84	3,61
Kab. Blitar	2015	20.925.500.000.000	81	30,67	4,11
Kab. Ponorogo	2015	11.687.900.000.000	34	30,09	3,53
Kab. Bangkalan	2015	16.906.800.000.000	20	30,46	3,00
Kab. Ngawi	2015	11.223.100.000.000	27	30,05	3,30
Kab. Malang	2015	16.949.600.000.000	80	30,46	4,38
Kab. Nganjuk	2015	14.875.400.000.000	45	30,33	3,81
Kab. Probolinggo	2015	19.571.000.000.000	64	30,61	4,16
Kota Probolinggo	2015	6.628.800.000.000	47	29,52	3,85
Kab. Sampang	2015	11.874.500.000.000	25	30,11	3,22
Kab. Mojokerto	2015	46.792.300.000.000	270	31,48	5,60
Kab. Situbondo	2015	11.086.500.000.000	97	30,04	4,57

NAMA DAERAH	TAHUN	PDRB	JI	LN_PDRB	LN_JI
Kab. Pamekasan	2015	9.316.900.000.000	75	29,86	4,32
Kab. Jombang	2015	22.960.200.000.000	161	30,76	5,08
Kab. Bojonegoro	2015	46.892.800.000.000	88	31,48	4,48
Kab. Kediri	2015	24.007.700.000.000	122	30,81	4,80
Kab. Lamongan	2015	22.316.900.000.000	150	30,74	5,01
Kota Kediri	2015	72.945.500.000.000	36	31,92	4,03
Kab. Banyuwangi	2015	44.529.900.000.000	280	31,43	5,63
Kota Madiun	2015	8.455.400.000.000	58	29,77	4,36
Kota Malang	2015	41.952.100.000.000	269	31,37	5,59
Kab. Gresik	2015	81.360.400.000.000	603	32,03	6,40
Kab. Pasuruan	2015	84.415.700.000.000	811	32,07	6,70
Kab. Jember	2015	44.222.600.000.000	176	31,42	4,33
Kab. Sidoarjo	2015	112.012.900.000.000	978	32,35	6,89
Kota Surabaya	2015	324.215.200.000.000	957	33,41	6,86

Lampiran 3. Data Variabel X_3 dan Y

NAMA DAERAH	TAHUN	JP	PPR	LN_JP	LN_PPR
Kab. Bangkalan	2013	937.497	923.992.317	13,75	20,64
Kab. Banyuwangi	2013	1.582.586	2.157.384.879	14,21	21,49
Kab. Bondowoso	2013	752.791	263.215.081	13,53	19,39
Kab. Gresik	2013	1.227.101	149.599.373.143	14,62	23,43
Kab. Blitar	2013	1.136.701	3.040.662.525	13,94	21,84
Kab. Jember	2013	2.381.400	6.141.451.314	14,68	24,84
Kab. Bojonegoro	2013	1.227.704	1.614.845.263	14,02	21,20
Kab. Jombang	2013	1.230.881	73.652.887.249	15,26	25,02
Kab. Madiun	2013	671.883	3.155.626.134	13,42	19,57
Kab. Kediri	2013	1.530.504	1.249.992.038	14,24	20,95
Kab. Magetan	2013	625.703	3.684.588.900	13,35	19,72
Kab. Malang	2013	2.527.087	3.025.650.278	14,74	21,83
Kab. Lamongan	2013	1.186.382	1.188.838.775	13,99	20,90
Kab. Lumajang	2013	1.023.818	758.816.420	13,84	20,45
Kab. Mojokerto	2013	1.057.808	10.084.391.809	13,87	23,03
Kab. Pacitan	2013	547.917	417.332.538	13,21	19,85
Kab. Nganjuk	2013	1.033.597	576.384.573	13,85	20,17
Kab. Pasuruan	2013	1.556.711	2.068.180.898	14,26	23,75
Kab. Ngawi	2013	824.587	512.884.425	13,62	20,06
Kab. Sidoarjo	2013	2.040.968	8.900.173.479	14,53	25,21
Kab. Pamekasan	2013	827.407	65.114.703.544	13,63	20,29
Kab. Ponorogo	2013	863.890	822.633.351	13,67	20,53
Kab. Probolinggo	2013	1.123.204	872.083.100	13,93	20,59
Kab. Sampang	2013	913.499	660.783.775	13,73	20,31
Kab. Situbondo	2013	660.702	9.058.621.840	13,40	20,62
Kab. Sumenep	2013	1.061.211	3.806.313.301	13,87	22,06
Kab. Trenggalek	2013	683.791	626.332.287	13,44	20,26
Kab. Tuban	2013	1.141.497	5.646.536.310	13,95	22,45
Kab. Tulungagung	2013	1.009.411	961.809.323	13,13	20,68
Kota Batu	2013	196.189	538.970.899	12,19	20,11
Kota Blitar	2013	135.702	291.192.439	11,82	19,49
Kota Kediri	2013	276.619	1.674.670.730	12,84	21,24

NAMA DAERAH	TAHUN	JP	PPR	LN_JP	LN_PPR
Kota Madiun	2013	174.114	2.568.333.345	12,07	21,67
Kota Malang	2013	840.803	10.716.211.079	13,64	20,79
Kota Mojokerto	2013	123.805	1.224.403.176	11,73	20,93
Kota Pasuruan	2013	192.285	843.743.801	11,43	18,25
Kota Probolinggo	2013	223.881	799.792.561	12,32	20,50
Kota Surabaya	2013	2.821.929	106.146.474.640	15,39	25,39
Kab. Bangkalan	2014	945.821	803.178.709	13,76	20,50
Kab. Banyuwangi	2014	1.588.082	2.189.877.851	14,28	21,51
Kab. Blitar	2014	1.140.793	1.762.015.684	13,95	21,29
Kab. Bojonegoro	2014	1.232.386	1.618.577.421	14,02	21,20
Kab. Bondowoso	2014	756.989	339.417.305	13,54	19,64
Kab. Gresik	2014	1.241.613	2.879.402.658	14,03	21,78
Kab. Jember	2014	2.394.608	5.408.722.902	14,69	24,71
Kab. Jombang	2014	1.234.501	1.313.977.640	14,03	21,00
Kab. Kediri	2014	1.538.929	1.273.896.087	14,25	20,97
Kab. Lamongan	2014	1.187.084	2.461.379.512	13,99	21,62
Kab. Lumajang	2014	1.026.378	425.609.830	13,84	19,87
Kab. Madiun	2014	673.988	383.699.260	13,42	19,77
Kab. Magetan	2014	626.614	373.090.314	13,35	19,74
Kab. Malang	2014	2.544.315	3.016.200.621	14,75	21,83
Kab. Mojokerto	2014	1.070.486	5.103.521.130	13,88	22,35
Kab. Nganjuk	2014	1.037.723	626.692.485	13,85	20,26
Kab. Ngawi	2014	827.829	567.032.622	13,63	20,16
Kab. Pacitan	2014	549.481	931.650.350	13,22	20,65
Kab. Pamekasan	2014	836.224	581.469.919	13,64	22,48
Kab. Pasuruan	2014	1.569.507	2.163.698.431	14,27	23,80
Kab. Ponorogo	2014	865.809	887.083.240	13,67	20,60
Kab. Probolinggo	2014	1.132.690	823.746.283	13,94	20,53
Kab. Sampang	2014	925.911	841.256.121	13,74	20,55
Kab. Sidoarjo	2014	2.083.924	4.761.962.109	14,55	24,59
Kab. Situbondo	2014	666.013	962.571.612	13,41	20,69
Kab. Sumenep	2014	1.067.202	2.042.932.512	13,88	21,44
Kab. Trenggalek	2014	686.781	235.315.483	12,75	19,28
Kab. Tuban	2014	1.141.097	717.516.404	13,95	20,39
Kab. Tulungagung	2014	1.015.974	610.873.416	13,14	20,23
Kota Batu	2014	198.608	504.821.136	12,20	20,04
Kota Blitar	2014	136.903	180.269.820	11,83	19,01
Kota Kediri	2014	278.072	1.759.204.185	12,54	21,29
Kota Madiun	2014	174.373	2.603.825.753	12,07	21,68
Kota Malang	2014	845.973	5.524.019.905	13,65	22,43
Kota Mojokerto	2014	124.719	709.239.126	11,73	20,38
Kota Pasuruan	2014	193.329	471.248.844	11,44	17,67
Kota Probolinggo	2014	226.777	861.011.615	12,33	20,57
Kota Surabaya	2014	2.833.924	124.300.629.650	15,39	25,55
Kab. Tuban	2015	1.152.915	53.755.475	12,35	17,80
Kab. Trenggalek	2015	689.200	89.605.020	12,75	18,31
Kab. Lumajang	2015	1.030.193	92.403.240	13,63	18,34
Kab. Magetan	2015	627.413	9.314.375	13,35	18,35
Kota Pasuruan	2015	194.815	98.753.886	11,46	18,41
Kab. Tulungagung	2015	1.021.190	112.646.620	13,14	18,54
Kota Mojokerto	2015	125.706	194.075.075	11,74	19,08

NAMA DAERAH	TAHUN	JP	PPR	LN_JP	LN_PPR
Kab. Sumenep	2015	1.072.113	279.551.723	13,89	19,45
Kab. Bondowoso	2015	761.205	290.827.354	13,54	19,49
Kab. Madiun	2015	676.087	386.883.636	13,42	19,77
Kota Blitar	2015	137.908	421.847.102	11,83	19,86
Kab. Pacitan	2015	550.986	440.595.950	13,22	19,90
Kota Batu	2015	200.485	470.671.373	12,21	19,97
Kab. Blitar	2015	1.145.396	483.368.842	13,95	20,00
Kab. Ponorogo	2015	867.393	53.244.650	13,67	20,09
Kab. Bangkalan	2015	954.305	535.993.123	13,77	20,10
Kab. Ngawi	2015	828.783	621.180.820	13,63	20,25
Kab. Malang	2015	1.023.818	758.816.420	13,84	20,45
Kab. Nganjuk	2015	1.041.716	773.056.025	13,86	20,47
Kab. Probolinggo	2015	1.140.480	775.409.467	13,95	20,47
Kota Probolinggo	2015	229.013	922.230.669	12,34	20,64
Kab. Sampang	2015	936.801	1.021.728.467	13,75	20,74
Kab. Mojokerto	2015	1.080.389	122.650.450	13,89	20,93
Kab. Situbondo	2015	669.713	13.743.750	13,41	21,04
Kab. Pamekasan	2015	845.314	14.245.204	13,65	21,08
Kab. Jombang	2015	1.240.985	1.483.133.620	14,03	21,12
Kab. Bojonegoro	2015	1.236.607	161.053.732	14,03	21,20
Kab. Kediri	2015	1.546.883	1.626.307.931	14,25	21,21
Kab. Lamongan	2015	1.187.795	1.770.941.888	13,99	21,29
Kota Kediri	2015	280.004	1.843.737.640	12,54	21,34
Kab. Banyuwangi	2015	1.594.083	2.222.370.823	14,28	21,52
Kota Madiun	2015	174.995	2.639.318.160	12,07	21,69
Kota Malang	2015	851.298	331.828.731	13,65	21,92
Kab. Gresik	2015	1.259.313	156.027.125	14,05	23,47
Kab. Pasuruan	2015	1.581.787	2.289.578.792	14,27	23,85
Kab. Jember	2015	2.407.115	315.264.552	14,69	24,17
Kab. Sidoarjo	2015	2.117.279	485.213.764	14,57	24,61
Kota Surabaya	2015	2.848.583	115.749.218.725	15,39	25,47

Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
PDRB	114	3.446.800.000.000	324.215.200.000.000	33.078.293.859.649
JI	114	13	978	169
JP	114	123.805	2.848.583	1.002.851
PPR	114	9.314.375	149.599.373.143	7.092.293.980
Valid N (listwise)	114			

Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
				1		
	PDRB	,768	,225	,438	3,405	,001
	JI	,351	,151	,225	2,330	,022
	JP	,382	,182	,198	2,102	,038

a. Dependent Variable: PPR

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000009
	Std. Deviation	17072964885,1 2100600
Most Extreme Differences	Absolute	,372
	Positive	,372
	Negative	-,205
Kolmogorov-Smirnov Z		3,968
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,05152739
	Absolute	,058
Most Extreme Differences	Positive	,058
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,843

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

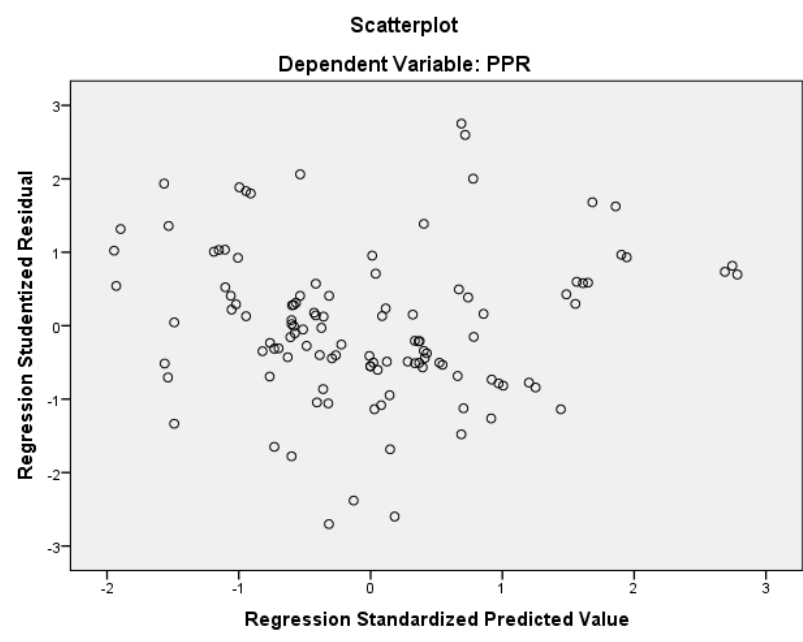
Lampiran 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-9,180	5,045			
	PDRB	,768	,225	,438	,209	4,775
	JI	,351	,151	,225	,371	2,698
	JP	,382	,182	,198	,389	2,569

a. Dependent Variable: PPR

Lampiran 9. Hasil Uji Scatterplot



Lampiran 10. Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,481	3,135		,791	,430
1 PDRB	-,014	,140	-,020	-,099	,922
JI	,162	,094	,264	1,727	,087
JP	-,145	,113	-,192	-1,288	,201

a. Dependent Variable: Absolute Residual

Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 ^a	,619	,609	1,06577	1,794

a. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

b. Dependent Variable: PPR



Lampiran 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 ^a	,619	,609	1,06577	1,794

a. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

b. Dependent Variable: PPR

Lampiran 13. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	202,962	3	67,654	59,562	,000 ^b
Residual	124,945	110	1,136		
Total	327,908	113			

a. Dependent Variable: PPR

b. Predictors: (Constant), JP, JI, PDRB

Lampiran 14. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,180	5,045		-1,820	,072
	PDRB	,768	,225	,438	3,405	,001
	JI	,351	,151	,225	2,330	,022
	JP	,382	,182	,198	2,102	,038

a. Dependent Variable: PPR

Lampiran 15. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Ulva Novita Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 1 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 22 Tahun
 Alamat : Dsn. Purwodadi RT/RW 02/01, Ds. Ngancar, Kec. Ngancar, Kab. Kediri
 No. HP : 081232497880
 Email : ulfanovit@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan****Pendidikan Formal**

2000 - 2002 : TK Dharma Wanita Ngancar II
 2002 - 2008 : SDN Ngancar I
 2008 - 2011 : SMPN 1 Wates
 2011 - 2014 : SMAN 1 Kediri
 2014 - 2018 : Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi

2016 : Kepala Bidang Tari UKM Unit Aktivitas Karawitan dan Tari (UNITANTRI) Universitas Brawijaya
 2016 : Kepala Departemen Tari Tradisi LOF Sanggar Seni Mahasiswa (SSM) Fakultas Ilmu Administrasi
 2017 : Kepala Bidang Tari UKM Unit Aktivitas Karawitan dan Tari (UNITANTRI) Universitas Brawijaya

Pengalaman Kepanitiaan

2015 : Koordinator Divisi Humas dalam program kerja UNITANTRI yaitu "Gebyar Festival Tari ke XXIII"
 2015 : Staff Divisi *Sponsorship* dalam program kerja SSM yaitu "Simfoni Senja II"
 2016 : Staff Divisi Acara dalam program kerja Himpunan Mahasiswa Perpajakan yaitu "ITSA (*Indonesian Taxation Student Association*) *First National Conference*"

Pengalaman Magang

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tahun 2017